

No. **167** Januari - Februari 2020

BaKTI**News** www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



KISAH PARA PAHLAWAN PESISIR INDONESIA:
DARI MERUSAK MENJADI MELINDUNGI

GOTONG ROYONG DALAM PENDIDIKAN

5 CARA DOBRAK STEREOTRIP
PERAN GENDER DALAM KELUARGA

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU
Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Praktik Cerdas & Info Buku **SUMARNI ARIANTO**
Database & Sirkulasi **FADHILAH MANSYUR**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Editor Foto

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTI**News** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

Daftar Isi

BaKTI!News

Januari - Februari 2020

No. 167

- 1** Mitigasi Kekerasan dan Pengabaian Hak Anak Melalui Data SIAK di Kota Makassar
Oleh **HAMSAH SINRING**
- 5** Melampaui Gelombang Tinggi Demi Anak Papua Yang Sehat dan Cerdas
Oleh **DEWI LINGGASARI**
- 9** Kisah Para Pahlawan Pesisir Indonesia Dari Merusak Menjadi Melindungi
Oleh **ALI YANSYAH ABDURRAHIM**
- 13** Strategi Alternatif Pengembangan BUMDES di Nusa Tenggara Barat
Oleh **HERMAN RAKHA**
- 17** Sinergitas untuk Membangun Papua dan Papua Barat
Oleh **FADHILAH MANSYUR**
- 21** Proyek Lapangan Wujudkan Mimpi Alumni INSPIRASI
Oleh **SHERLY HEUMASSE**
- 25** Ambulans Motor 17 Tahun Menjangkau Layanan Kesehatan Pedesaan
Oleh **MANSETUS BALAWALA**
- 29** Gotong Royong dalam Pendidikan
Oleh **ITA IBNU**
- 34** 5 Cara Dobrak Stereotip Peran Gender dalam Keluarga
Oleh **ASHAFIRA AMALIA**
- 37** Partisipasi Perempuan di Negeri Kilang
Oleh **YAN WEMAY & M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 40** InfoBuku
- Foto Cover :
Abdurrahman Doge/TNP2K

Hampanan ladang di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Foto: **Abdurrahman Doge/TNP2K**





Foto: Dok. Yayasan BAKTI

Mitigasi Kekerasan dan Pengabaian Hak Anak melalui Data SIAK di Kota Makassar

Oleh **HAMSAH SINRING**

Mitigasi, lazim dibaca dalam istilah mitigasi bencana yang artinya upaya untuk mengurangi resiko atau meminimalisir korban akibat bencana yang berpotensi terjadi. Mitigasi dalam tulisan ini dimaknai sebagai upaya mengurangi atau mencegah potensi terjadinya kekerasan dan pengabaian hak-hak anak dimulai dengan perencanaan perlindungan dan pelayanan anak berbasis data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Potensi kerentanan yang mungkin dialami anak di suatu daerah dapat

dicegah apabila kebijakan dan program layanan anak bagi OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) menggunakan data tentang anak berbasis data SIAK.

SIAK adalah sistem informasi dan *database* kependudukan nasional yang disusun berdasarkan prosedur pelayanan administrasi kependudukan berbasis *online*. Sistem *database* ini bertujuan untuk menyajikan data kependudukan dan pencatatan sipil yang mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Nikah, dan sebagainya. Kelebihan dari SIAK selain untuk mendata kependudukan secara akurat juga memberikan NIK secara otomatis dan tetap untuk satu penduduk, sehingga dapat mencegah terjadinya kepemilikan identitas ganda.

Terdapat 31 elemen data dalam SIAK dan setiap elemen data memuat banyak sekali jenis data termasuk data-data tentang anak. Data yang dibutuhkan dapat diagregasi per lokasi kecamatan, kelurahan/desa, jenis kelamin, dan umur. Bahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dapat mengeluarkan data per anak *by name by address* jika memenuhi syarat yang diatur Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 sampai dengan Pasal 99. Oleh karena itu penggunaan data per anak *by name by address* harus melalui perjanjian kerja sama antara Dinas Dukcapil dengan pihak pengguna atas persetujuan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Potensi Kerentanan Anak di Kota Makassar

Menemukan jenis-jenis kerentanan yang berpotensi dialami anak melalui data SIAK di Kota Makassar adalah hal yang *urgen* bagi OPD maupun penggiat program anak saat ini. Setidaknya terdapat tiga keunggulan jika para pihak menjalankan program dengan menggunakan data SIAK. Pertama, kebijakan dan pembangunan perlindungan serta pelayanan anak berdasarkan fakta dan data yang akurat dari KK dan NIK. Kedua, mengetahui keberadaan dan area rentan mengalami kekerasan anak di Kota Makassar sehingga program pelayanan anak tepat sasaran, inklusif dan lebih preventif. Ketiga,



Jumlah pekerja anak di usia sekolah meningkat dari tahun ke tahun, memicu berbagai pertanyaan, apakah minimnya akses pendidikan atau karena kemiskinan semata.

Foto : Deni Regianto

Efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran program layanan anak dapat dikelola sejak awal perencanaan karena berbasis data.

Berikut ini data agregat SIAK 2017-2018 yang berhasil diekstrak dan dianalisis oleh Dinas Dukcapil Makassar bekerja sama dengan Unicef melalui Yayasan BaKTI. Setiap jenis data diagregasi berdasarkan umur, jenis kelamin, kelurahan, dan kecamatan. Demikian juga analisis makna setiap jenis data telah disosialisasikan ke sejumlah OPD terkait yakni, Dinas Sosial, Dinas DP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dukcapil, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Agama, BAPAS, dan beberapa LSM penggiat program anak. Semuanya sepakat untuk menggunakan data yang berbasis Nomor

Induk Kependudukan untuk program layanan terhadap anak.

Jika mencermati makna hasil analisis dari setiap jenis data di atas, maka ditemukan area kerentanan anak seperti kekerasan fisik dan mental, pengabaian hak-hak anak, dan tanpa layanan kesejahteraan sosial. Akibatnya, banyak anak tidak tersentuh program bantuan apa pun.

Di bawah ini beberapa jenis data anak yang penting menjadi perhatian dan referensi bagi pengambil kebijakan dan perencana program perlindungan dan pelayanan anak:

Pekerja Anak Usia 15-17 Tahun

Jumlah anak bekerja di Makassar meningkat dua tahun terakhir. Tahun 2017 berjumlah 136.202 anak dan pada tahun 2018 sebanyak 151.464 anak. Dari ekstrak data ini menimbulkan beberapa pertanyaan reflektif antara lain: faktor apa yang menyebabkan mereka bekerja di usia sekolah? Apa mereka tidak bisa mendapatkan akses pendidikan? Apakah orang tuanya tidak mampu membiaya pendidikan anaknya? Bagaimana upaya pihak-pihak terkait untuk mengurangi jumlah anak bekerja dan membekali mereka modal pengetahuan dan keterampilan kecakapan hidup dengan pendidikan yang memadai?

Anak usia 15-18 tahun menikah dan menjadi kepala keluarga

Hasil ekstrak data merefleksikan situasi dan beberapa pertanyaan yang perlu ditemukan jawabannya antara lain: Mengapa masih banyak terjadi kasus pernikahan usia anak dan bagaimana mencegahnya? Apakah mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketahanan keluarga? Bagaimana dengan tempat tinggal layak, akses air bersih dan sanitasi? Apakah anak-anak mereka mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial, kesehatan? Seberapa jauh mereka mendapatkan bimbingan *parenting* atau pola pengasuhan anak?

NO JENIS DATA ANAK

1	Anak Usia 15 – 18 Tahun Status Sebagai Kepala Keluarga
2	Anak Usia 15 – 18 Tahun Status Perkawinan Cerai Mati
3	Anak Usia 15 – 18 Tahun Status Perkawinan Cerai hidup
4	Anak dibawah Usia 15 Tahun Status Perkawinan Cerai Mati
5	Anak dibawah Usia 15 Tahun Status Perkawinan Cerai hidup
6	Anak Usia di bawah 15 tahun hubungan keluarga adalah famili lain
7	Anak Usia 15 – 18 Tahun hubungan statis lainnya
8	Anak Usia di bawah 15 tahun hubungan keluarga adalah famili lain
9	Anak usia di bawab 15 – 18 tahun hubungan status lainnya
10	Anak Usia 15 – 18 Tahun Status Famili lain tinggal bersama Kepala Keluarga Usia di atas 60 tahun
11	Anak Usia 15 – 18 Tahun dengan penyebab kematian sakit biasa
12	Anak Usia 15 – 18 Tahun dengan penyebab kematian pandemi/wabah penyakit
13	Anak Usia 15 – 18 Tahun dengan penyebab kematian kecelakaan
14	Anak Usia 15 – 18 Tahun dengan penyebab kematian kriminalitas
15	Anak Usia 15 – 18 Tahun dengan penyebab Kematian Bunuh Diri
16	Anak Usia 15 – 18 Tahun dengan penyebab kematian lainnya
17	Anak Usia 15 – 18 Tahun dengan penyebab kematian sakit biasa
18	Anak Usia di bawah usia 15 tahun dengan penyebab kematian pandemi/wabah penyakit
19	Anak Usia di bawah 15 tahun dengan penyebab kematian Kecelakaan
20	Anak Usia di 15 tahun dengan penyebab kematian kriminalitas
21	Anak Usia di bawah 15 tahun dengan penyebab kematian bunuh diri
22	Anak Usia di bawah 15 tahun dengan penyebab kematian lainnya
23	Anak usia di bawah 7 – 15 tahun tidak/belum sekolah
24	Anak Usia 15 tahun yang tinggal bersama Kepala Keluarga yang tidak bekerja
25	Anak usia di bawah 15 tahun yang tinggal bersama kepala keluarga yang tidak bekerja

Anak usia di bawah 15 tahun yang tinggal bersama kepala keluarga yang tidak bekerja

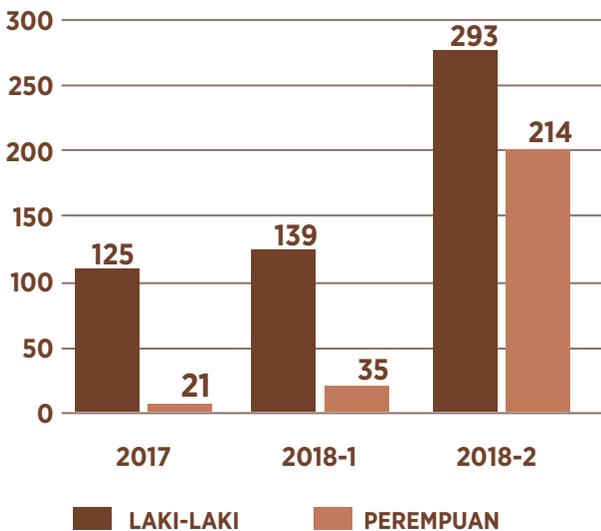
Dari data ini, terdapat hampir 9.000 orang anak yang berusia di bawah 15 tahun yang tinggal bersama kepala keluarga yang tidak bekerja dan tersebar di 15 kecamatan. Pertanyaan reflektif untuk situasi ini antara lain: Apakah mereka mendapatkan hak perlindungan, layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial? Apakah kepala keluarga orang tua kandungnya sendiri

DATA SIAK DINAS DUKCAPIL TAHUN 2017

NO JENIS DATA ANAK

1	Anak usia 0-18 tahun per kelurahan tahun 2017
2	Anak tinggal dengan famili lain per kelurahan tahun 2017
3	Anak menikah per kelurahan tahun 2017
4	Anak menikah dan menjadi kepala keluarganya tahun 2017
5	Anak sudah bekerja tahun 2017
6	Kepala keluarga seorang ibu tahun 2017
7	Orang tua cerai hidup-mati dengan anak 0-18 tahun tahun 2017
8	Anak usia pendidikan yang tidak/belum sekolah per kelurahan 2017
9	Anak pengakuan seorang Ibu 2017
10	Anak adopsi 2017
11	Anak migrasi terpisah dengan orang tuanya 2017
12	Anak usia sekolah 2017
13	Kematian anak 2017

ANAK SUDAH MENIKAH DAN MENJADI KEPALA KELUARGA



atau status famili lain? Jika status famili lain, maka mereka sangat rentan dengan berbagai penelantaran ataupun kekerasan.

Orang tua cerai hidup-mati dengan anak usia 0-18 tahun

Dari data ini ditemukan peningkatan jumlah orang tua cerai hidup-mati di tahun 2018. Jika di tahun 2017 jumlahnya 13.263 kasus cerai meningkat di tahun 2018 menjadi 15.301 kasus

cerai. Pertanyaan kritis untuk situasi tersebut antara lain: Apakah anak-anak mereka tetap terjamin pemenuhan hak-hak perlindungan, hidup layak, serta layanan anak lainnya? Hal ini perlu menjadi perhatian para pihak yang terkait oleh karena perceraian orang tua menimbulkan banyak dampak buruk bagi anak.

Jumlah anak yang tinggal dengan famili lain

Data ini juga perlu menjadi perhatian oleh pemerintah dan semua *stakeholders* anak di Makassar. Tren jumlah anak yang tinggal dengan famili lain meningkat tajam dalam semester 2 tahun 2018. Jika dalam semester 1 hanya 4.258 anak maka dalam semester 2 menjadi 16.134 anak. Pertanyaan kritis untuk situasi ini antara lain: Faktor yang menyebabkan mereka tinggal terpisah dengan orang tuanya. Faktor yang menyebabkan terjadi perpindahan anak peningkatan pesat dalam kurun waktu Juli-Desember?.

Keseluruhan jenis data dari SIAK tahun 2017-2018 menyajikan isu penting dan perlu menjadi perhatian segenap *stakeholders*, guna memetakan potensi terjadinya pengabaian hak-hak dan kekerasan terhadap anak. Sehingga ada upaya mitigasi yang dilakukan sejak dini. Salah satunya, Bappeda Kota Makassar memfasilitasi Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk menggunakan seluruh elemen data anak dari SIAK Dukcapil untuk perencanaan program layanan anak secara inklusif melalui Sistem Informasi Manajemen data Anak Terpadu (SIMPANDU) yang berbasis data dari SIAK.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi tentang Program Kerjasama Unicef-BaKTI dapat menghubungi email: info@bakti.or.id



MELAMPAUI GELOMBANG TINGGI DEMI ANAK PAPUA YANG SEHAT DAN CERDAS

Oleh **DEWI LINGGASARI**

Saya tahu, bahwa pada awal tahun Laut Arafura mendidih. Gelombang berubah seolah lidah ombak yang marah, tidak mengurungkan niat saya. Saya sudah alpa pada dua kegiatan pencairan sebelumnya, dan sebagai anggota Sekretariat Bersama BANGGA Papua, saya malu alpa yang ketiga kali.

BANGGA Papua adalah program perlindungan sosial yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Papua. Kabupaten kami, Asmat, terpilih menjadi salah satu kabupaten uji coba pelaksanaan program tersebut, bersama Lanny Jaya dan Paniai. Desember 2018 hingga Januari 2019 adalah pertama kalinya BANGGA Papua melakukan pencairan dana untuk penerima manfaat.



Foto-foto: Abdul Rahman Ramlan/Yayasan BaKTI

Risiko menempuh gelombang Laut Arafura dari Ibukota Asmat, Agats, menuju Distrik Fayit adalah langkah saya menebus dua kali alpa. Di pagi mendung bulan Januari 2019 setelah berkumpul untuk arahan serta doa di dermaga feri, akhirnya Tim Sekber BANGGA Papua Kabupaten Asmat berpencar ke beberapa distrik berbeda untuk bertugas memfasilitasi pencairan dana.

Saya bersama sembilan anggota Sekber yang lain serta tim keamanan menempatkan diri pada sebuah *speed boat*, memulai sekitar dua jam perjalanan ke Basim, Ibu kota Distrik Fayit dalam cuaca yang tak bersahabat. Lepas dari muara, gelombang belum menakutkan. Akan tetapi, tak lama kemudian ombak mengamuk setinggi gunung. Sejauh mata memandang air laut cokelat bagai kopi susu, bergemuruh pada gelombang

yang berlarian. Empat *speedboat* terpelanting seakan daun kering. Aneh, tak seorang pun dari penumpang tampak ketakutan. Ada yang tersenyum, melambai bahkan mengambil gambar tanpa perlu mengenakan pelampung. Sementara saya, merasakan jantung berdetak lebih kencang. Karena gentar, saya melindungi diri dengan pelampung, mencengkeram tas ransel yang berisi dua botol air mineral kosong.

Air laut melambung, membasahi pakaian. Saat itu saya tersadar, betapa dekat jarak antara kehidupan dan kematian. Saya menahan air mata, Yuli Maniagasi, gadis pemberani yang duduk di samping saya masih mampu menguasai rasa takut. Ia tampak tenang seakan gelombang adalah sensasi permainan di arung jeram.

Puji syukur, perjalanan yang sulit ini terlampaui ketika *speedboat* akhirnya menuju muara sungai, mendekati Basim, ibukota Distrik Fayit. Tegur sapa serta cerita seru dari anggota Sekber menyebabkan semua tahu, tak seorang pun melewati bahaya seorang diri.

Melayani Tanpa Lelah

Esoknya, kami mulai dengan mempersiapkan tempat kegiatan di halaman Polsek, mulai dari meja-meja layanan termasuk untuk verifikasi data, menyiapkan 'swalayan' sementara, menyesuaikan diri dengan posisi kantor Bank Papua, serta berkoordinasi dengan PLN agar listrik tetap menyala.

Kami duduk di belakang meja sesuai tugas masing-masing. Penerima manfaat dikelompokkan menurut setiap kampung. Saya duduk di belakang meja verifikasi data penerima manfaat, memanggil satu demi satu penerima manfaat. Ibu Ety Manduli, bertugas memverifikasi data dan Yuli duduk di balik meja pengaduan. Empi, Paulus, dan Kepala Kampung bertugas mengkoordinasikan peserta penerima dana BANGGA Papua.

Semula nama-nama yang dipanggil tidak mengalami kendala. Akan tetapi, ada nama ibu yang dipanggil kemudian tidak sesuai dengan daftar, tidak sesuai dengan kartu keluarga. Tim verifikasi bekerja ekstra ketat. Ternyata seorang ibu berganti nama sesuai marga suami setelah perkawinan terjadi, dan hal ini membingungkan petugas verifikasi.

Hari pertama terus berlalu, pelayanan terus berlanjut dari satu kampung ke kampung berikut. Ada satu kampung yang warganya telah memiliki KTP Elektronik, ada yang menyertakan surat keterangan identitas pada Pemilu Gubernur, ada yang semuanya memiliki Kartu Keluarga, ada pula yang tidak memiliki kartu identitas, sehingga identitas yang bersangkutan harus disesuaikan dengan Kartu Keluarga yang ada pada kami.

Sesuai dengan ketentuan, seorang anak akan menerima 200 ribu rupiah per bulan dan karena pembayaran tahun 2018 dilakukan sekali, maka seorang ibu dengan satu orang anak berusia 4 tahun ke bawah akan menerima 200 ribu rupiah selama 12 bulan atau 2,4 juta rupiah. Bila anaknya yang berusia tersebut ada lebih dari satu, maka jumlah tersebut dikalikan dengan jumlah anak. Ibu menjadi penerima langsung dana BANGGA Papua karena merekalah yang paling tahu kebutuhan anak dalam keluarga. Kebijakan ini juga sekaligus untuk menguatkan peran mereka dalam keluarga sebagai perwujudan dukungan bagi kesetaraan gender.

Ibu-ibu yang telah menerima dana dari Bank Papua diarahkan ke 'swalayan' yang telah kami siapkan. Di sana, mereka bisa membeli bahan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, atau bisa juga membeli kebutuhan sehari-hari untuk anak mereka.

Hari pertama berlangsung hingga tengah malam. Keesokan harinya pelayanan kembali berlangsung, satu demi satu peserta dipanggil sesuai daftar. Suasana Basim yang semula lengang, kali ini menjadi riuh rendah oleh kehadiran penerima manfaat BANGGA Papua dari tiga distrik yaitu Fayit, Safan, dan Aswi disertai dengan seluruh anggota keluarga. Kami memang menyiapkan beberapa titik pembayaran yang melayani beberapa distrik terdekat. Ini untuk memudahkan para penerima manfaat agar tidak perlu datang jauh-jauh ke ibu kota kabupaten. Kamilah yang mendekati kepada mereka.

Proses tidak selamanya lancar. Ada juga ibu yang protes karena namanya tidak terdaftar. Oleh



anggota Sekber mereka diarahkan untuk mendaftar agar bisa menjadi penerima manfaat di tahun berikutnya.

Bapak Bupati Hadir Memberikan Semangat

Pelayanan terus berlangsung mengikuti rotasi matahari dari suhu terendah hingga terik, dari pakaian basah kuyup karena keringat, hingga kering menjelang sore hari. Suasana Basim kian ramai dan hidup. Kunjungan Bupati Asmat, Kapolres, dan Ketua Sekber BANGGA Papua Kabupaten Asmat benar-benar menghibur. Setelah hari-hari yang sibuk dan melelahkan, kedatangan mereka serasa memberi kami tambahan semangat. Seperti halnya kami yang pernah melampaui gelombang pasang, maka rombongan Bupati Asmat telah melewati lidah ombak yang sama. Mereka bahkan segera kembali menjelang sore hari, melewati bahaya serupa.

Pada hari berikut persoalan muncul karena ada ibu penerima manfaat yang dikabarkan telah meninggal. Pihak Bank Papua meminta surat keterangan kematian sebagai legalitas hukum bagi penerima pengganti. Semula saya koordinasikan surat keterangan kematian ke



Foto-foto: **Abdul Rahman Ramlan/Yayasan BaKTI**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) lewat aplikasi *whatsapp*. Akan tetapi, seorang bapak marah besar karena menunggu terlalu lama. Saya teringat, selaku Sekretaris Dinas Dukcapil saya berwenang pula menandatangani surat keterangan kematian atas pernyataan dari kepala kampung. Akhirnya, persyaratan surat keterangan kematian teratasi.

Hari berikut berlanjut, kami mengira pelayanan akan selesai dalam lima hari. Ternyata sampai hari Sabtu baru separuh pelayanan. Butuh kerja keras, ketelitian dan kesabaran dari tim Sekber untuk mengurai semua masalah itu. Bukan hal yang mudah karena kadang kala kami harus berhadapan dengan amarah dari warga yang merasa dirinya berhak mendapatkan dana BANGGA Papua, padahal sebenarnya tidak memenuhi persyaratan.

Pagi terakhir suasana di Basim mulai tampak lengang, keluarga penerima manfaat dari tiga distrik telah menerima haknya. Keluarga dari kampung yang jauh akan menyusul. Sekitar 1.200 penerima manfaat sudah terlayani, 500 keluarga akan diselesaikan pada hari berikut.

Ketika akhirnya empat *speedboat* berlabuh di dermaga dengan selamat, tergegap kami

mengepak barang, bersiap kembali ke Agats. Ketika berangkat kami adalah anggota tim. Tetapi ketika kembali, kami telah menjadi anggota keluarga yang saling membantu. Kami memahami kesulitan masing-masing, sehingga hak masyarakat dapat dipenuhi dengan baik.

Perjalanan ini telah membuat kami saling menguatkan dan bekerja bersama untuk mewujudkan mimpi anak-anak Papua yang lebih sehat dan cerdas.

Tujuan strategis BANGGA Papua adalah meningkatkan kualitas SDM orang asli Papua melalui peningkatan gizi dan kesehatan anak. Sumber dana BANGGA Papua dari dana Otsus sehingga masyarakat merasakan manfaat dana Otsus secara langsung. Sasaran program adalah anak orang asli Papua berusia di bawah 4 tahun. Setiap anak berhak atas dana 200 ribu rupiah per bulan. Dana digunakan untuk membeli atau menyediakan makanan dengan gizi seimbang untuk anak. Dana diterima langsung oleh ibu/wali sah anak melalui transfer bank.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua, dapat menghubungi info@bakti.or.id



KISAH PARA PAHLAWAN PESISIR INDONESIA

Dari Merusak Menjadi Melindungi

Oleh **ALI YANSYAH ABDURRAHIM**

Penangkapan ikan menggunakan bom dan sianida terlarang di Indonesia sejak tahun 2004. Sayangnya, di tengah berbagai upaya penegakan hukum tidak menutup kemungkinan nelayan melakukan tindakan ilegal ini. Padahal, melindungi ekosistem kelautan justru menjadi kepentingan nelayan.

Sepanjang tahun 2016 hingga 2018, sebagai peneliti ekologi manusia LIPI membawa saya ikut serta dalam penelitian di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, yang merupakan bagian dari *Coral Triangle* atau Segitiga Terumbu Karang, sebuah kawasan perairan yang terbentang di enam negara di Asia Tenggara dan Pasifik dan terkenal memiliki terumbu karang yang beragam dan unik.



Foto: Yusuf Ahmad/Wayasan BaKTI

Bersama tim *Capturing Coral Reef Ecosystem Services* (CCRES) saya berkesempatan untuk tinggal bersama komunitas pesisir di tiga desa untuk mempelajari mengapa dan bagaimana sebuah komunitas nelayan di Indonesia berhenti menggunakan bahan peledak dan sianida untuk mendapatkan ikan.

Penelitian kami menunjukkan bahwa beberapa individu yang sebelumnya menjalankan praktik perikanan yang merusak ternyata dapat bertransformasi menjadi pemimpin yang menginspirasi dan memengaruhi masyarakat untuk melindungi terumbu karang.

Kami mengumpulkan kisah mereka yang mempraktikkan perikanan berkelanjutan, mulai dari mantan pelaku pengeboman ikan hingga para kepala desa dan pegawai pemerintahan yang telah bekerja melampaui apa yang menjadi tugas mereka demi melindungi laut.

Mereka memiliki kisah unik dan berbeda satu sama lain tentang bagaimana mengubah cara pandang mereka terhadap laut, dari yang merusak menjadi melindungi. Namun, benang merah dari kisah mereka adalah mereka menjalani transformasi setelah terlibat dalam program pemerintah yang dinamakan Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang/*Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (COREMAP).



Foto: Helen Ross

YUDI ANSAR

Kematian Teman Mendorong Perubahan Perspektif

Yudi Ansar melakukan praktik menangkap ikan dengan menggunakan bom sejak lulus sekolah menengah atas. Hingga suatu hari, ia menyaksikan empat orang temannya tewas menggunakan bom untuk menangkap ikan.

Yudi yang kini berusia 38 tahun tidak dapat mengingat dengan pasti kapan insiden itu terjadi. Pada saat itu, ia dan teman-temannya belum mengetahui pelarangan penggunaan bom dan sianida untuk menangkap ikan.

Ia menambahkan bahwa saat itu penegakan hukum di Desa Batangmata Sapo, tempat tinggalnya yang terletak di pesisir timur Pulau Selayar, masih sangatlah lemah. Sehabis kecelakaan tersebut, Yudi berhenti menjadi nelayan dan mencari pekerjaan lain. Ia kemudian pindah ke Desa Patikarya, salah satu desa yang masuk ke dalam program COREMAP.

Ia lalu mengambil bagian dalam Lembaga Pengelola Sumberdaya Pesisir (LPSP), yang menyediakan program mata pencarian alternatif bagi nelayan yang ingin meninggalkan praktik perikanan yang merusak ekosistem laut. Program yang ditawarkan antara lain produksi ikan asin dan terasi.

Saat ini, Yudi masih bekerja sebagai fasilitator dan Ketua LPSP bagi Desa Patikarya, sebuah peran yang membuatnya bisa menjadi *influencer* bagi nelayan lainnya untuk meninggalkan praktik menangkap ikan dengan pengeboman dan pembiusan.



Foto: A.Y. Abdurrahim

MUHAMMAD ARSYAD

Mantan Mentor Perikanan
Dengan Bahan Peledak
dan Sianida

Muhammad Arsyad mulai menangkap ikan menggunakan bahan peledak sejak tahun 1987, sebuah praktik umum yang ada di desa asalnya di Kabupaten Sinjai.

Selain menggunakan bahan peledak, Arsyad juga mempelajari pembiusan ikan dengan sianida dari sebuah perusahaan asing yang berbasis di Hong Kong. Ia dipekerjakan oleh perusahaan tersebut menjadi pembeli ikan kerapu dan lobster hidup dari para nelayan di Desa Bontolebang, Selayar dan sekitarnya. Perusahaan tersebut meminta Arsyad agar mengajarkan nelayan lainnya menggunakan sianida.

Arsyad juga punya usaha sampingan membuat ikan asin/kering. Karena usahanya semakin berkembang, ia menghentikan kegiatan menangkap ikan pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, ia menjadi aparat pemerintah Desa Bontolebang dan terlibat aktif dalam program COREMAP yang mulai dilaksanakan di desa tersebut. Melalui program tersebut, ia mulai menyadari tentang dampak negatif dari praktik menangkap ikan menggunakan bahan peledak dan sianida.

Tahun 2008, Arsyad terpilih menjadi Kepala Desa Bontolebang. Menggunakan pengaruhnya sebagai kepala desa dan mantan 'bos' bagi komunitas nelayan di daerah tersebut, Arsyad mencoba memengaruhi 'bos-bos' lainnya untuk menghentikan pengeboman ikan dan berhasil.

Ia juga turut melibatkan para istri dan anak nelayan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya terumbu karang dan mata pencaharian lain. Perpustakaan desa dipenuhinya dengan buku-buku tentang fungsi terumbu karang, cara pemrosesan ikan, cara membuat kerajinan, dan cara beternak ayam.



Foto: Helen Ross

MAPPALEWA

Dipenjara Karena Bom Ikan

Mappalewa, telah ditangkap tiga kali karena menangkap ikan dengan bahan peledak dan sianida. Kini, Mappalewa menjadi ketua dari Lembaga Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (LPSP).

Ia mulai menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan di tahun 1980-an setelah mengetahui penangkapan ikan dengan bom mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Pada tahun 2000-an, ia mulai menggunakan sianida karena melihat nelayan lain mampu mendapatkan ikan berukuran besar dalam jumlah yang banyak.

Pada saat itu, setelah pemerintah melarang pemboman dan sianida untuk menangkap ikan, Mappalewa justru berusaha menyuap oknum petugas lokal agar bebas dari hukuman saat melakukan praktik merusak tersebut.



Foto-foto: Yusuf Ahmad/Nayasan BAKTI

Belakangan ia menghentikan kegiatan dan upaya yang buruk tersebut. Sebagai ketua LPSP, ia mengampanyekan ke nelayan lainnya bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan sianida, selain melanggar hukum, juga secara finansial tidak akan berkah.



Foto: A.Y. Abdurrahim

ANDI HIDAYATI

Pemimpin Desa Perempuan
yang Menghentikan
Perikanan Merusak

Andi Hidayati, yang berasal dari keluarga 'bangsawan' bagi penduduk Desa Bungaiya, awalnya memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal karena melihat nelayan di luar desanya yang senaknya melakukan pengeboman dan pembiasan ketika menangkap ikan di perairan desanya.

Ia lalu menemukan bahwa sekitar 30 persen dari 246 nelayan di Desa Bungaiya ternyata terlibat

dalam praktik pengeboman dan pembiasan tersebut.

Selama ia menjadi Kepala Desa Bungaiya, salah satu wilayah kerja Program COREMAP. Akhirnya mengetahui bahwa masyarakatnya tidak mengetahui bahwa praktik penggunaan bahan peledak dan sianida untuk menangkap ikan merupakan praktik ilegal.

Kala itu, penduduk desa beralasan bahwa apabila tidak menggunakan bom untuk menangkap ikan, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Hal ini disebabkan oleh kompetisi dengan nelayan desa tetangga untuk berebut ikan.

Meski demikian, ia berhasil meyakinkan penduduk Desa Bungaiya untuk bisa mengadopsi pilihan mata pencarian lainnya yang diperkenalkan melalui program COREMAP agar penghidupan mereka tetap terjaga, seperti produksi bakso ikan, makanan kecil, dan produk lainnya yang berbahan dasar ikan.

Lebih lanjut, Hidayati juga menggunakan pengaruhnya sebagai kepala desa untuk mengeluarkan peraturan desa (Perdes) tentang daerah perlindungan laut, yang isinya mengatur zona penangkapan, jenis-jenis alat pancing yang boleh digunakan, hingga sanksi yang akan dikenakan jika melanggar Perdes tersebut.

Untuk memberantas dan mencegah praktik perikanan yang destruktif/ilegal, ia juga aktif dalam melakukan patroli dan pengawasan laut yang dilakukan bersama aparat hukum dan kelompok masyarakat pengawasan.

Profil tokoh ini telah dipublikasikan di "Pengaruh sosial pada perlindungan terumbu karang: tokoh dan strategi mereka dari Selayar, Indonesia" yang diterbitkan oleh CCRES, sebuah proyek yang mengembangkan model, toolkit dan karya ilmiah lainnya untuk membantu pemerintah, pembuat kebijakan, dan perencana untuk mengelola ekosistem pesisir dan, dengan ini, dapat menjamin keberlanjutan penerima manfaat/fungsi ekosistem oleh komunitas pesisir.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Peneliti Ekologi Manusia pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Studi ini adalah bagian dari the Capturing Coral Reef and Related Ecosystem Services Project (CCRES), yang didanai oleh Global Environment Facility dan dikelola oleh Bank Dunia dan The University of Queensland.

Sumber: <https://theconversation.com/kisah-para-pahlawan-pesisir-indonesia-dari-merusak-menjadi-melindungi-124316?>



Strategi Alternatif Pengembangan BUMDES di Nusa Tenggara Barat

Oleh
HERMAN RAKHA

Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Maret 2018 masih berada di bawah 1 persen. Ini menyebabkan semakin besarnya kesenjangan ekonomi berdasarkan indeks keparahan kemiskinan di NTB. Ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan di NTB juga meningkat dari 0.522 pada September 2017 menjadi 0.601 pada Maret 2018.



Foto-foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

Untuk menurunkan kesenjangan ekonomi antara desa dan kota di NTB, Pemerintah Provinsi NTB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 menjadikan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program unggulan. Sayangnya akibat minimnya sumberdaya manusia untuk secara kreatif mengelola lembaga tersebut, usaha simpan-pinjam menjadi unit usaha utama yang difavoritkan sebagai aktivitas BUMDes. Padahal terdapat banyak alternatif usaha yang dapat

dilirik untuk mengembangkan BUMDes, antara lain bidang pelayanan publik, perdagangan dan sebagainya.

Kemiskinan di NTB

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada Maret 2018 mencapai 737 ribu orang atau 14,75 persen dari total populasi NTB. Walaupun terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar sekitar 10 ribu orang atau 0,30 persen pada periode September 2018 hingga Maret 2018, terjadi peningkatan keparahan kemiskinan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

Indeks Keparahakan Kemiskinan untuk wilayah perkotaan di Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan dari 0,762 pada September 2017 menjadi 0,905 pada Maret 2018. Adapun Indeks Keparahakan Kemiskinan untuk wilayah perdesaan meningkat dari 0,522 pada September 2017 menjadi 0,601 pada Maret 2018. Dari angka-angka ini juga terlihat kesenjangan yang besar antara keparahan kemiskinan di wilayah perkotaan (0,905) dengan wilayah perdesaan (0,601).

Perihal kemiskinan di NTB juga dapat dipandang dari jumlah desa berstatus berkembang dan tertinggal di setiap kabupaten. Terdapat 431 dari total 1.140 desa dan kelurahan di NTB yang termasuk dalam kategori desa berkembang dan desa tertinggal. Upaya penanganan yang serius perlu dilakukan di desa-desa tersebut agar dapat meningkat menjadi desa yang mandiri.

Dalam rancangan RPJMD 2018-2023, Pemerintah Provinsi NTB telah menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen setahun. Dua ide yang mengemuka untuk penurunan kemiskinan dari tingkat desa adalah melalui pengembangan Desa Wisata dan BUMDes.

BUMDes di NTB

Meningkatkan kesejahteraan asli desa adalah salah satu tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diamanatkan dalam dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan



Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk itu, sesuai dengan tujuannya keberadaan BUMDes diharapkan mampu membangun pembangunan ekonomi di desa.

Salah satu BUMDes di NTB yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2016 adalah BUMDes Lentera Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Lombok Timur. BUMDes Lentera mendapatkan penghargaan karena inovasinya dalam pengelolaan sumber daya air yang dimiliki di wilayah tersebut. Melalui Tigasa perusahaan air minum yang dikelola BUMDes Lentera mampu menjual air dengan harga 200 rupiah per meter kubik yang melayani 778 pelanggan di 13 Dusun yang ada di Desa Lendang Nangka. Keuntungan yang diperoleh BUMDes Lentera dalam pengelolaan air minum sebesar 4 juta rupiah per bulan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa terdapat 424 BUMDes yang ada di NTB namun, hanya 224 BUMDes yang usahanya aktif berjalan. Terdapat cukup banyak kendala bagi BUMDes yang ada di NTB untuk menggerakkan perekonomian desa. Salah satu di antaranya adalah terbatasnya sumberdaya manusia dan minimnya kreativitas dalam mengelola BUMDes. Kebanyakan pengurus

BUMDes lebih mengutamakan kegiatan permodalan yang telah umum dilakukan. Tidak sedikit BUMDes yang kemudian bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro atau lembaga simpan pinjam.

Tak dapat dipungkiri lembaga keuangan simpan pinjam memang masih menjadi jenis usaha yang mampu menciptakan multi efek bagi ekonomi desa karena sebagai lembaga mampu mendukung para pelaku ekonomi desa. Namun, jenis usaha ini juga memiliki banyak risiko antara lain risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, suku bunga, nilai tukar valuta asing, dan lingkungan peraturan dan kepatuhan.

Kendala lain yang menghambat pengembangan BUMDes antara lain minimnya sarana dan prasarana produksi, akses promosi dan pemasaran, serta terbatasnya kemampuan dalam administrasi usaha. Selain itu BUMDes yang ada di NTB masih berjalan sendiri-sendiri, belum ada upaya koordinasi antar wilayah untuk bekerja sama mengembangkan BUMDes.

Alternatif Pengembangan Usaha BUMDes

Secara mendasar, BUMDes menjalankan bisnis sosial untuk melayani warga Desa pada. Dengan kata lain, bisnis yang dijalankan BUMDes ini harus memberikan keuntungan sosial bagi warga desa, selain keuntungan materil untuk membiayai kegiatan BUMDes dan memastikan keberlanjutan pelayanannya.



Sumber: www.youtube.com/channel/UCNpqMwQQXcR0yoqS2Qfpr8A

Salah satu kegiatan yang dapat dikerjakan BUMDes adalah memberikan pelayanan dalam hal penarikan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Peluang ini sangat terbuka mengingat jumlah kendaraan bermotor di NTB pada tahun 2017 sebanyak sebanyak lebih dari 1,5 juta unit dan pada tahun yang sama tercatat penambahan 120.562 kendaraan baru atau meningkat 7,42 persen dari jumlah kendaraan tahun 2016.

Pola kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah NTB dengan BUMDes akan memberikan keuntungan bagi BUMDes melalui upah yang diberikan dari setiap pajak yang dibayar masyarakat. Fungsi pelayanan BUMDes kepada masyarakat juga dapat dilakukan melalui usaha BUMDes untuk menalangi warga yang belum memiliki uang untuk membayar pajak kendaraan dimana selanjutnya warga akan membayar ke BUMDes secara berangsur. Selain itu kerjasama ini juga merupakan suatu upaya untuk membangun kesadaran tentang pentingnya membayar pajak.

BUMDes juga dapat menjalankan bisnis dagang dengan menjual hasil produksi Masyarakat Desa atau barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa atau bahkan memasarkan produk dari masyarakat pada pasar yang lebih luas.

Sebagai daerah agraris di Indonesia, sektor pertanian memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 21%. BUMDes di NTB dapat memanfaatkan keberadaannya sebagai pengumpul hasil

pertanian masyarakat. BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMD yang ada di tingkat Kabupaten/Kota ataupun dengan BUMD milik provinsi sehingga, kepastian harga di tingkat petani yang selama ini dipermainkan oleh sistem pasar yang tidak berpihak menjadi lebih terjamin. Selain itu pengembangan BUMDes dalam kategori ini dapat dilakukan untuk potensi-potensi desa lainnya seperti pada kerajinan masyarakat, sektor makanan olahan desa, dan lain sebagainya.

Kelangkaan pupuk, obat-obatan, dan bibit yang seringkali dialami oleh petani di NTB ketika musim tanam tiba dapat menjadi potensi pengembangan usaha bagi BUMDes di NTB. Artinya BUMDes dapat berperan sebagai distributor input pertanian tersebut sehingga jaminan ketersediaan dan harga yang selama ini menjadi suatu persoalan ketika musim tanam tiba dapat diatasi. BUMDes dapat melakukannya melalui pengembangan beberapa sistem pembayaran. BUMDes dapat menyalurkan terlebih dahulu kebutuhan para petani ketika musim tanam tiba dengan syarat ketika panen maka, BUMDes menjadi prioritas pertama yang menjadi pembeli dari hasil panen masyarakat/petani.

Kesimpulan

- 1 Diperlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi pengelola BUMDes di NTB agar mampu memetakan potensi kewilayahan yang ada sebagai basis pengembangan BUMDes.
- 2 Paradigma BUMDes yang hanya mengejar keuntungan (profit) agar lebih diperluas seperti penambahan fungsi pelayanan yang apabila dikelola secara profesional juga akan mendatangkan pemasukan bagi usaha BUMDes.
- 3 Usaha-usaha BUMDes dalam perdagangan dapat diarahkan kepada usaha perdagangan yang mampu menyerap usaha masyarakat di desa, bukan hanya fokus pada perdagangan barang jadi yang selama ini dilakukan oleh sebagian BUMDes di NTB.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Staf Peneliti Lombok Research Center dan dapat dihubungi melalui email boogiederaya@gmail.com



Sinergitas Untuk Membangun Papua dan Papua Barat

Oleh **FADHILAH MANSYUR**

Keberhasilan pelaksanaan sebuah program salah satunya ditentukan oleh jumlah dukungan yang diterima. Sinergitas menjadi kunci utama berjalannya seluruh program dengan baik. Hal inilah yang menjadi dasar pelaksanaan *Roadshow* di delapan kabupaten intervensi KOMPAK-LANDASAN di Papua dan Papua Barat.

Program KOMPAK-LANDASAN telah berjalan sejak tahun 2017 di lima kabupaten di Papua dan empat kabupaten di Papua Barat dengan tujuan

utama meningkatkan akses masyarakat di Tanah Papua terhadap pelayanan dasar yang berkualitas.

Selama kurun waktu dua tahun tersebut, program ini telah meningkatkan kapasitas di setiap unit layanan, yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan kampung. Capaian program tersebut cukup signifikan antara lain keberadaan kader sebagai agen perubahan di kampung, tersedianya data dan sistem pendataan di kampung, kesadaran pemerintah tentang proses perencanaan kampung yang tepat, pengetahuan Puskesmas tentang



Foto: Fadhilah Mansyur/Yayasan BaKTI

metode perencanaan berbasis kebutuhan dan permasalahan lokal, pengetahuan sekolah tentang perencanaan sekolah yang efektif, keberadaan Komite Sekolah dan kesadaran akan fungsi mereka.

Namun, capaian program tersebut tidak akan menghasilkan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa adanya kolaborasi yang tersistem. Menurut Ricky Djojono, Manajer Monitoring dan Evaluasi Program KOMPAK-LANDASAN, “Selama ini, kolaborasi seringkali dilakukan berdasarkan kedekatan bukan secara sistematis. Misalnya, kedekatan antara kepala kampung dan kepala sekolah yang berdampak kepada dukungan kampung terhadap pembangunan infrastruktur sekolah. Kolaborasi yang baik bukan hanya bersifat inisiatif personal melainkan sinergitas yang terinstitusionalisasi dan terbangun sebagai sistem. Sehingga diperlukan adanya pembangunan sinergitas antar unit layanan dasar dan kampung, juga kolaborasi untuk menjadikan semua proses menjadi sistem berkelanjutan”.

Mengawali sinergitas tersebut, tim KOMPAK-LANDASAN mengajak para Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) untuk duduk bersama membangun komitmen dalam mendukung sistem, kebijakan daerah, dan menyepakati mekanisme kolaborasi. Selama bulan September – Oktober 2019, Program KOMPAK-LANDASAN melaksanakan *roadshow* ke 8 kabupaten target di Papua dan Papua Barat yaitu Asmat, Boven Digoel, Nabire, Jayapura, Fakfak, Kaimana, Sorong dan Manokwari Selatan untuk membangun pemahaman pemerintah daerah yang menjadi target program, mengenai tujuan dan kegiatan-kegiatan program untuk mencapai tujuan tersebut, serta membangun komitmen mereka untuk berbagi peran dalam upaya mencapai tujuan yang disepakati.

Membangun Komitmen

Sesi penting yang menjadi tujuan utama pelaksanaan *Roadshow* ini adalah untuk membangun komitmen para OPD. Setidaknya terdapat enam poin komitmen pemerintah daerah yang tertuang dalam lembar komitmen. Tiga di antara komitmen tersebut adalah tentang pentingnya regulasi, pemilihan tim teknis yang tepat, dan dukungan pembiayaan untuk operasional keberlanjutan.

Tim teknis dari setiap kabupaten ini dipilih dari perwakilan masing-masing bidang yang menjadi intervensi Program KOMPAK-LANDASAN yaitu bidang kesehatan, terutama Puskesmas yang menjadi bagian dari program Dinas Kesehatan; Bidang Pendidikan, yakni Kepala Sekolah, Pengawas, dan bagian program Dinas Pendidikan; Bidang Pemberdayaan Kampung, yakni Distrik dan bagian program DPMK; dan perwakilan dari Bappeda. Tim teknis ini selanjutnya mendapatkan pelatihan (*Training of Trainer*) untuk menjadi fasilitator Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan November dipusatkan di provinsi masing-masing yaitu Papua dan Papua Barat.

Setelah pembentukan tim teknis, hal penting lainnya yang perlu disepakati adalah masalah pembiayaan. Saat ini banyak program pemerintah terkait peningkatan layanan dasar yang terhambat karena masalah anggaran seperti kekurangan dana atau kurang tepatnya pengalokasian anggaran. Seperti pengakuan salah satu peserta *Roadshow* yang mengatakan bahwa sekolah dasar didaerahnya tidak mendapatkan alokasi anggaran karena dana



untuk Pendidikan seluruhnya diserahkan untuk PAUD dan perpustakaan.

Disinilah peran tim teknis kembali diharapkan untuk bekerjasama melihat kembali permasalahan dalam unit-unit layanan dasar kesehatan, pendidikan dan kampung selanjutnya mengontrol dan melihat perkembangan sumber pendanaan daerah untuk membiayai seluruh program pemerintah yang dapat mendorong peningkatan layanan dasar tersebut.

Apabila sistem kolaborasi antar OPD telah terbangun dan sumber pendanaan telah ditetapkan, maka hal selanjutnya yang perlu segera dilakukan adalah penyusunan regulasi terkait peningkatan pelayanan dasar ini. Adanya regulasi daerah diharapkan dapat menjadi dasar sinergitas yang berkelanjutan di daerah tersebut.

Selama *Roadshow* juga, tim Program KOMPAK-LANDASAN memberi pemahaman bahwa keberadaan program ini adalah untuk mendukung peningkatan kinerja daerah. Oleh karena itu, peran aktif dari tim teknis provinsi dan kabupaten dalam memastikan implementasi program sangat dibutuhkan.

Hal ini juga disadari oleh Hengky Tewu, Asisten II Bidang Administrasi Setda Kabupaten Manokwari Selatan. Beliau menekankan adanya regulasi untuk menginstitutionalkan sinergitas, untuk itu perlu adanya penambahan OPD dari Biro Hukum dan Tapem untuk pelaksanaannya.

Pemetaan Pemangku Kepentingan

Salah satu tahapan dalam pembangunan sinergitas ini adalah memetakan para pemangku kepentingan dari setiap kabupaten untuk mendukung sinergitas antara unit layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan kampung. Peta pemangku kepentingan ini menyajikan informasi tentang aktor-aktor kunci yang akan terlibat dan bagaimana keterlibatan mereka dapat memengaruhi jalannya program.

Pemangku kepentingan Program KOMPAK-LANDASAN adalah aparat sipil negara dari lembaga pemerintahan pada tingkat provinsi, kabupaten maupun distrik yang dapat memengaruhi jalannya program melalui berbagai proses pengambilan keputusan. Pengaruh para pemangku kepentingan ini dapat menyukseskan



Foto-foto: Fadhilah Mansyur/Yayasan BaKTI

pelaksanaan program atau sebaliknya. Setiap pemangku kepentingan memiliki pengaruh dan kekuasaan sesuai porsinya. Semakin besar pengaruh yang dimiliki, maka semakin penting untuk diperhitungkan keterlibatannya dalam proyek.

Hasil dari pemetaan pemangku kepentingan ini menggambarkan siapa saja yang memiliki kepentingan atau peran secara langsung dan tidak langsung terhadap program. Posisi yang berperan di setiap daerah dapat berbeda-beda. Misalnya di Kabupaten Kaimana, dukungan terbesar langsung dari Bupati dan Wakil Bupati.

Model Sinergitas

Roadshow ini juga dirangkaikan dengan Konsultasi Modul Panduan Sinergitas Kampung, dan Unit Layanan. Hal ini karena fokus implementasi Program KOMPAK-LANDASAN Fase II adalah membangun dan menginstitutionalisasi mekanisme untuk mensinergikan upaya-upaya unit layanan, kampung/masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan aktual

bidang kesehatan dan pendidikan dasar di masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat untuk bersinergi adalah kampung dan unit-unit layanan dasar kesehatan dan pendidikan yaitu Puskesmas dan sekolah atau madrasah ibtidaiyah yang berada di wilayah intervensi Program KOMPAK-LANDASAN.

Kampung perlu bersinergi dengan unit-unit layanan karena keberhasilan unit layanan melakukan fungsinya dalam pemberian layanan yang bermutu berarti yang diuntungkan adalah masyarakat yang dilayani. Upaya dari unit layanan juga akan memberikan hasil lebih efektif bagi masyarakat apabila mereka juga turut melakukan peran yang tidak dilakukan oleh unit layanan untuk mendukung tercapainya hasil.

Dalam pemaparannya saat Konsultasi Panduan Model Sinergitas tersebut, Ricky Djojbo memaparkan bahwa “Kesamaan arah dan tujuan” merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan sinergitas antara kampung dan unit – unit layanan. Oleh karena itu, model sinergitas yang disusun oleh tim program juga berdasarkan hal tersebut. Selain itu, fungsi unit layanan adalah untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat, maka dalam hal ini harapan dan kebutuhan masyarakat akan menjadi tujuan yang dapat mempersatukan arah dari upaya kampung, Puskesmas dan sekolah.

Harapan dan kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan perlu ditangkap oleh unit-unit layanan tersebut untuk selanjutnya diinternalisasi dalam proses perencanaan di kampung. Selanjutnya, unit-unit layanan membuat perencanaan menyeluruh yang terdiri dari hal-hal yang dapat dilakukan oleh unit layanan dari masukan masyarakat tersebut. Perencanaan tersebut kemudian diinformasikan kembali ke masyarakat.

Apabila masyarakat kampung dapat melihat dengan jelas bahwa rencana kerja unit layanan juga dapat diarahkan untuk memenuhi harapan yang berasal dari masyarakat, maka sinergitas kampung dengan unit layanan diharapkan dapat berjalan dengan baik di setiap kampung.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II dapat menghubungi info@bakti.or.id

Proyek Lapangan Wujudkan Mimpi Alumni INSPIRASI

Oleh **Sherly Heumasse**

Delapan alumni Program INSPIRASI Tahun 2018 mengerjakan proyek kerja lapangan (*fieldwork project*) sebagai tanggung jawab setelah kembali ke Indonesia. Program INSPIRASI (*Indonesia Young Leaders Programme*) dikelola oleh UnionAID bekerja sama dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Universitas Teknologi Auckland (AUT), Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia dan didukung oleh *New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade* (MFAT). Tujuan Program ini untuk membantu para pemimpin muda dari Indonesia Timur untuk

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri mereka sehingga mereka dapat menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan di masyarakatnya dan wilayah Indonesia Timur yang lebih luas.

Yayasan BaKTI sebagai mitra program INSPIRASI di Indonesia mendapat mandat untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta mengikuti perkembangan proyek lapangan yang dikerjakan oleh alumni. Proyek lapangan yang dikunjungi di awal, *Co-Designing alternative earnings for housewives who live near the Popayato Paguat landscape di Gorontalo* dan *School-Based Child Sexual Abuse Prevention Programme* di Kota Makassar.

Merancang Alternatif Pendapatan Untuk Ibu Rumah Tangga

Proyek *Co-Designing alternative earnings for housewives who live near the Popayato Paguat landscape* di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo dikerjakan oleh Citra Al Rasyid, dari Lembaga Burung Indonesia Gorontalo. Proyek ini bertujuan untuk melindungi hutan dan spesies kunci di Bentang Alam Popayato-Paguat dengan cara mengembangkan peluang mata pencaharian. November 2019, BaKTI mengunjungi proyek lapangan yang berlokasi di Dusun Molopoga, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo – Pohuwato. Dusun Molopogo dipilih sebagai lokasi proyek karena jarang tersentuh oleh program dan belum ada aktifitas usaha perempuan berbasis rumah tangga.

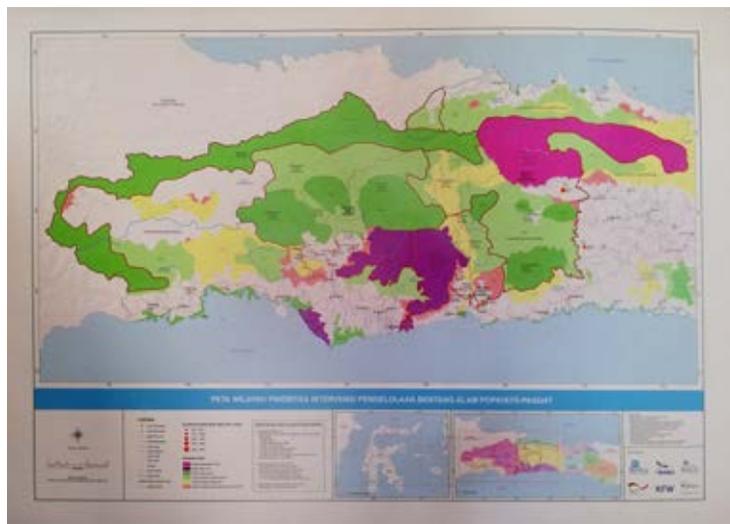


Foto-foto: Sherly Heumasse/Yayasan BaKTI

Monitoring diawali dengan bertemu dan berdiskusi dengan ibu-ibu rumah tangga yang menjadi target proyek untuk *brainstorming* jenis-jenis usaha berbasis rumah tangga yang akan dijalankan. Ini merupakan pertemuan ke-4 sejak proyek dimulai. Kesempatan ini digunakan Citra untuk kembali menegaskan kepada ibu-ibu program pengembangan usaha perempuan ini harus berbasis rumah tangga dan dilakukan saat waktu luang di rumah sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di dusun. Pertemuan ini, menghasilkan keputusan bersama, ada dua jenis usaha rumah tangga yang akan dilakukan. Pertama, usaha kelompok katering makanan. Selama ini belum ada usaha katering di dusun ini dan banyak kegiatan keagamaan dan pertemuan pemerintah desa yang membutuhkan konsumsi makanan sehingga ini menjadi peluang bagus. Kedua, usaha individu berupa kue dan keripik pisang. Kenapa? Bahan baku tersedia di dusun sehingga modal usaha yang murah. Beberapa rencana tindak lanjut yang disepakati bersama diantaranya, pembentukan pengurus/ penanggung jawab kelompok usaha bersama katering, pelatihan bersama (uji coba) membuat makanan, pembuatan *market place* sebagai tempat pemasaran *online* dengan nama 'Portal Kuliner Desa Karya Baru' serta Pengenalan Bisnis Model Canvas agar bersama-sama merancang usaha dengan baik.

Selama kunjungan, BaKTI berkesempatan bertemu dan berdiskusi dengan beberapa orang yang terlibat dalam proyek lapangan ini. Seorang ibu rumah tangga Merlin Adam, istri Kepala Dusun (23 tahun) mengatakan sangat senang dan bersyukur ada peluang usaha dari rumah yang akan dikembangkan oleh Burung Indonesia Gorontalo bagi ibu-ibu di dusun Molopogo. Selama ini banyak waktu luang mereka yang terbuang setelah aktifitas mengurus rumah tangga.



Sedangkan fasilitator desa, Masniar Tahudin (38 tahun) yang banyak mendukung dalam berbagai pertemuan dengan warga mengungkapkan bahwa proses *co-design* yang diperkenalkan Citra sangat bermanfaat dan membantu tugasnya sebagai fasilitator masyarakat. Ketika proyek baru dimulai, Masnia banyak mendampingi Citra memfasilitasi pertemuan dengan kepala desa, kepala dusun dan ibu-ibu responden menggunakan proses *co-design*. Masnia berkomitmen untuk terus mendampingi dan mendukung ibu-ibu agar mereka tetap semangat untuk menjalankan usahanya.

Proyek ini juga mendapat dukungan dari pemerintah desa setempat. Kepala Dusun Molopoga, Suprin Suma (29 tahun) sejak awal proyek ini aktif mendorong ibu-ibu di dusunnya untuk turut berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Citra. “Saya akan menjadi penyambung lidah bagi para suami yang belum paham tentang kegiatan ini sehingga mereka turut mendukung usaha istrinya” ungkap Suprin sembari tersenyum.

Sebagai lembaga pelaksana proyek lapangan ini, Burung Indonesia Gorontalo memegang peranan penting. *Program Manager* dari Burung Indonesia Gorontalo, Bapak Amsurya Amsa berterimakasih dan mengapresiasi Program INSPIRASI yang telah memberikan peluang belajar yang sangat baik kepada stafnya (Citra).

Citra membagikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama belajar di New Zealand seperti *co-designing process*, manajemen proyek kepada staf lain di Burung Indonesia Gorontalo. “*Fieldwork project* yang dikerjakan Citra ini terintegrasi dengan program yang dilakukan Burung Indonesia sehingga saling mendukung dan bersinergi termasuk mendorong perencanaan partisipatif dan isu gender. Keterlibatan perempuan saja tidak cukup tetapi keberpihakan terhadap perempuan jauh lebih penting”, kata Pak Amsurya.

Saat ini telah terbentuk beberapa kelompok perempuan dan produk unggulan melalui program Burung Indonesia dan dikerjakan oleh ibu-ibu, diantaranya usaha minyak kelapa di Desa Karya Baru. Burung Indonesia memberi dukungan teknis seperti penyediaan rumah produksi dan pelatihan-pelatihan. Harapannya, kelompok usaha yang dibentuk dari *fieldwork project* INSPIRASI, dapat bersinergi dan memperkuat kelompok usaha yang telah ada sebelumnya. Burung Indonesia Gorontalo berkomitmen untuk tetap melanjutkan kegiatan proyek ini, walaupun pendanaan dari UnionAID telah selesai.

Melibatkan Orang tua Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual

Proyek *School-Based Child Sexual Abuse Prevention Programme* yang dikerjakan oleh Andi



Foto-foto: Sherly Heumasse/Yayasan BaKTI

Arifayani, dari Yayasan LemINA Makassar mengambil lokasi proyek SD Inpres Kampus IKIP. Tujuan proyek ini untuk menciptakan *prototyping* lingkungan sekolah yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Monitoring yang dilakukan BaKTI di Desember 2019 bertepatan dengan kegiatan terakhir proyek ini, yaitu *Sharing* bersama orang tua siswa yang mengusung tema “Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual dan Pornografi”. Sebelumnya, LemINA telah melaksanakan 3 kali Pelatihan Pencegahan Pelecehan Seksual terhadap anak bagi guru-guru di sekolah tersebut. *Sharing* ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang tua pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual dan pornografi. Serta mengajak orang tua untuk bekerjasama dengan sekolah dalam mendukung terbentuknya lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Kepala Sekolah SD Inpres Kampus IKIP Makassar Hj. Sujirah dalam sambutan pembukaan sangat bersyukur dan berterima kasih karena sekolah ini sebagai pilot awal mendapatkan pembelajaran penting dan menyaksikan langsung proses transfer pengetahuan kepada anak-anak di sekolahnya bagaimana mengantisipasi kekerasan seksual dan pornografi terhadap mereka. “Saya sangat berharap pembelajaran dari program ini berkelanjutan dan mendorong guru-guru di

sekolah ini agar memasukan materi pembelajaran yang sudah di dapat sewaktu pelatihan dalam mengajar anak-anak” ungkap Ibu Hj. Sujirah.

Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Dasar Dr. Hikmah Manganni. Spd, MPd mewakili Dinas Pendidikan Kota Makassar mengapresiasi program yang telah dilakukan oleh Yayasan LemINA dan akan melibatkan LemINA dalam diskusi lebih lanjut mengenai PAUD.

Diakhir pertemuan, orang tua diminta untuk menulis pesan dan beberapa bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh orang tua setelah pertemuan ini. Harapannya semua pihak bergotong royong mencegah kekerasan seksual dan pornografi dengan memberikan edukasi sejak dini kepada anak.

Tantangan dalam menjalankan setiap program pasti ada, tantangan terbesar adalah terkait keberlanjutan program. Harapannya agar proyek lapangan yang dilaksanakan oleh kedua alumni program INSPIRASI dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat buat masyarakat. Selain itu ilmu yang diperoleh melalui program INSPIRASI dapat terus dibagikan dan diimplementasikan oleh alumni di lembaga tempat kerja alumni dan di masyarakat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program INSPIRASI, dapat menghubungi info@bakti.or.id

Ambulans Motor 17 Tahun Menjangkau Layanan Kesehatan Pedesaan

Oleh **MANSETUS BALAWALA**

G enap tujuh belas tahun Program Ambulans Motor dijalankan Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) sebagai bagian dari upaya memperjuangkan pengiriman tenaga kesehatan ke tempat-tempat yang sulit dijangkau.

Program Ambulans Motor bermula dari diskusi antara petugas kesehatan dan penyuluh lapangan Keluarga Berencana di tahun 2000. Dalam diskusi itu, terungkap salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak di Flores Timur adalah terlambat mendapat pertolongan. Banyaknya kasus kematian akibat terlambat ditolong antara lain disebabkan oleh minimnya sarana transportasi umum bagi masyarakat untuk mencapai Puskesmas dan minimnya keberadaan ambulans dari petugas kesehatan untuk menjangkau masyarakat.





Foto-foto: Mansetus Balawala

Untuk mengatasi persoalan tersebut, muncul ide untuk mengembangkan inisiatif Manajemen Sarana Transportasi (MST) khususnya pengelolaan *zero breakdown* sepeda motor yang digunakan oleh petugas kesehatan di pedesaan. Ide ini yang kemudian berkembang dan dikenal dengan nama Program Ambulans Motor.

Dalam upaya mencari mitra untuk merealisasikan ide ini, Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) bertemu dengan *Riders for Health* (RfH) Inggris yang telah mengembangkan inisiatif tersebut di beberapa negara di Afrika. Atas dukungan dari *Riders for Health* YKS berkesempatan mengikuti program magang manajemen sarana transportasi untuk pelayanan kesehatan di Harare, Zimbabwe pada Februari 2001. Sepulang dari program magang itu, inisiatif Ambulans Motor mulai direalisasikan dengan mengoperasikan 12 unit sepeda motor yang merupakan donasi dari organisasi penggemar sepeda motor dari beberapa negara di dunia melalui Simon Millward.

Melalui program yang dinamakan Manajemen Sarana Transportasi (MST) khususnya yang menargetkan tidak ada kerusakan *ambulance* atau kendaraan bermotor petugas kesehatan (*zero breakdown*), YKS melaksanakan beragam kegiatan untuk memastikan agar perawatan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan teliti dan tepat waktu.

Pada tahun 2015 YKS mendapatkan bantuan sebanyak 8 unit sepeda motor Revi Fit dari Pemerintah Australia melalui program AIPMNH, Astra International dan Komunitas Sepeda Motor Tiger 8000 di Inggris. Jenis kendaraan bermotor ini tampaknya lebih sesuai dengan petugas kesehatan perempuan karena berukuran lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan kendaraan bermotor yang disediakan sebelumnya.

YKS pun tetap memberikan edukasi petugas kesehatan yang kini semakin banyak perempuan agar dapat menggunakan kendaraan bermotor dengan lebih berhati-hati dan tetap memiliki pengetahuan yang baik dalam hal pemeliharaan mesin, kelengkapan berkendara, dan hal-hal terkait administratif misalnya menggunakan buku pencatatan untuk mencatat waktu penggunaan, kondisi suku cadang dan mesin kendaraan, serta aktivitas perawatan dan perbaikan yang dilakukan.

Dengan demikian kendaraan bermotor yang digunakan petugas kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Kendaraan operasional selalu dalam keadaan siap pakai dan jarang, bahkan hampir tidak pernah terjadi kerusakan pada saat sedang melakukan pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat sederhana namun ini menjadi salah satu kunci sukses dari keberlanjutan penjangkauan layanan.



15 Motor dan 3 Mobil Ambulans

Kini di Fase III Program, tepat di tahun ke-17, Program Ambulans Motor kembali melebarkan sayap dengan mengoperasikan 15 sepeda motor type CRF 150 dan 3 unit mobil ambulans, kerja sama YKS dengan Kedutaan Besar Jepang, Shell Indonesia dan Majalah Overland melalui *Motorcycle Outreach*-Inggris, yang diluncurkan secara resmi oleh Bupati Flores Timur, Anton Hadjon dan disaksikan Sekretaris II Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Yoshida, Kadis Kesehatan Flores Timur, dr. Ogie Silimalar dan Direktur YKS, Mansetus Balawala.

Sebanyak 15 unit motor dan 3 unit ambulans ini siap mendekatkan layanan kesehatan di lima kecamatan antara lain, Kecamatan Solor Barat, Wotan Ulumado, Adonara Tengah, Adonara Barat dan Lewolema. Pada wilayah ini terdapat banyak desa yang sulit dijangkau karena kondisi geografi dan akses jalan yang menantang.

Direktur YKS, Mansetus Balawala mengatakan bantuan sepeda motor ini menjadi penyemangat bagi teman-teman petugas kesehatan untuk lebih memaksimalkan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan tentu YKS masih membutuhkan kerja sama dengan semua pihak, sekiranya ke depan nanti ada Ambulans Laut untuk bisa menghubungkan dengan cepat setiap kasus emergensi yang di rujuk dari pulau-pulau karena selama ini ada ibu hamil yang dirujuk dari pulau terpaksa melahirkan diatas kapal kayu berukuran kecil tanpa fasilitas kesehatan yang memadai.

Balawala mengatakan, selama 17 tahun mengembangkan Program Ambulans Motor di wilayah ini, pihaknya merasa bahwa apa yang dilakukan bersama tim di YKS tidak terlalu luar biasa. Namun tidak demikian bagi orang-orang di luar sana. Mereka menilai inisiatif ini adalah sebuah terobosan inovatif yang berdampak nyata bagi upaya pendekatan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah pedesaan.

Cukup banyak apresiasi diberikan terhadap Program Ambulans Motor ini. Beberapa di antaranya adalah, Indonesia *MDGs Award* tahun 2011 dan *SATU Indonesia Award* tahun 2010. Pada tahun 2013, lembaga ini kembali mendapat apresiasi *The Ausaid Indonesia Social Inovator*



Program Ambulans Motor membantu menekan kasus kematian ibu anak dan mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di pedalaman di Flores Timur. (kiri) Foto : Dok. YKS Mansetus Balawala (kanan atas) Foto : Dok. Yayasan BaKTI Kerjasama YKS dan Vitamin Angels (kanan bawah) Foto : Dok. YKS



Award. Sementara di tahun 2019 Program Ambulans Motor dipilih menjadi bagian dari kampanye *Global 'hell Advance – Outride Anything'* dan menjadi salah satu finalis dalam ajang UN SDGs Action Awards 2019. Semua capaian ini karena kerja kolaboratif dan kemitraan yang kuat dengan semua pihak, terutama dengan Dinas Kesehatan Flores Timur, kepala puskesmas dan jajaran yang ada di bawahnya, teristimewa para pengendara kesehatan.

Kehadiran Program Ambulans Motor membawa kontribusi positif dalam menekan kasus kematian ibu anak dan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah pedalaman di Flores Timur. Sebut saja disaat program ini diimplementasikan pertengahan tahun 2002 kasus kematian ibu bertengger di angka 25 kasus, kematian bayi 77 kasus dan kematian Balita 92 kasus.

Namun perlahan-lahan kasus kematian ibu anak mulai menurun. Bahkan hingga semester pertama tahun 2019, kasus kematian ibu dan bayi/balita di lima wilayah kecamatan yang

diintervensi Program Ambulans Motor tidak ada sama sekali, sedangkan lahir mati terdapat tiga kasus. Begitupun halnya kasus-kasus gizi kurang dan buruk serta penyakit lain umumnya dari waktu ke waktu terus menurun jika dibandingkan dengan di awal program.

Kemudahan lain dengan hadirnya program ini adalah, respon terhadap panggilan pasien yang lebih cepat, adanya kunjungan rumah secara rutin dari petugas kesehatan, kemudahan dalam melayani kasus-kasus kesehatan, meningkatnya kunjungan para petugas kesehatan ke Posyandu, juga berbagai kemudahan lainnya dalam upaya memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat baik secara promotif, preventif dan kuratif.

Dukungan terhadap pekerja kesehatan yang dilakukan YKS tidak hanya sebatas pada kendaraan yang dioperasikan untuk mendekatkan layanan kesehatan namun juga menyediakan obat-obatan yang diperlukan berupa obat cacung, vitamin A merah biru dan multi vitamin untuk ibu hamil yang diberikan secara gratis dari YKS yang bekerja sama dengan *Vitamin Angels*, selain itu juga media-media informasi yang berkaitan dengan kesehatan.

Manajemen Sarana Transportasi (MST) khususnya pengelolaan *zero breakdown* sepeda motor untuk pelayanan kesehatan di pedesaan atau program Ambulans Motor adalah salah satu praktik cerdas yang didokumentasikan dan publikasikan oleh Yayasan BaKTI pada Festival Forum Kawasan Timur Indonesia Tahun 2009.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Direktur YKS dan dapat dihubungi lewat email: mans_motor@yahoo.co.id



Gotong Royong dalam Pendidikan

Oleh Ita Ibnu

“SDM unggul, Indonesia maju’ adalah tema peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun 2019. SDM unggul menjadi prasyarat utama dalam mendukung kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga menempatkan kualitas pendidikan yang inklusif serta kesempatan belajar yang merata sebagai salah satu agenda global yang terus diusahakan.

Dalam upaya pembangunan di bidang pendidikan serta capaian target TPB, pemerintah selama 10 tahun terakhir telah mengalokasikan 20 persen dari APBN dengan komposisi 50 persen untuk gaji dan



Foto: Abdurrahman Doge/TNP2K

tunjangan guru. Alokasi dana yang begitu besar, tidak serta merta mampu meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata, Capaian murid di Indonesia dalam *The Program for International Student Assessment (PISA) 2016* menunjukkan Indonesia masih berada di peringkat 62.

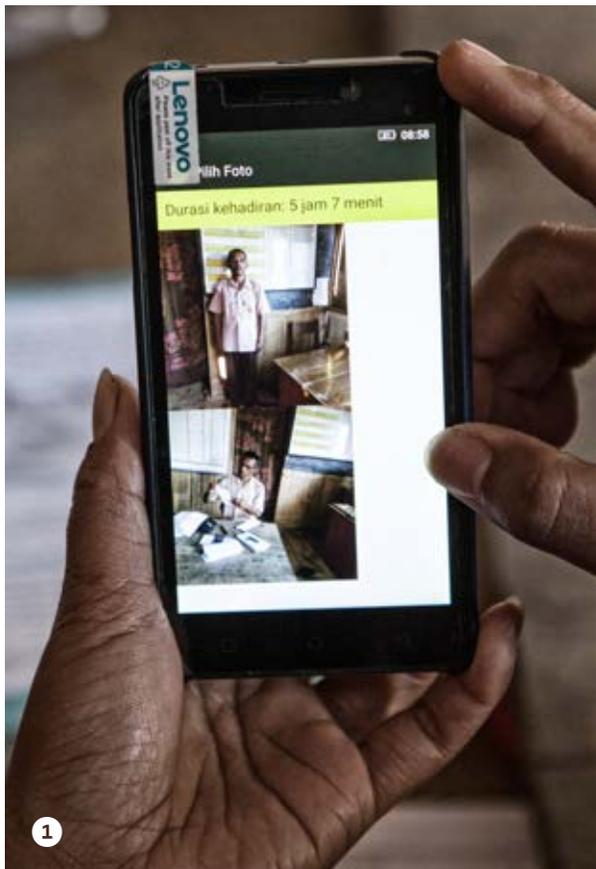
Untuk pemerataan akses pendidikan dengan menjamin kesediaan tenaga pengajar yang bersedia menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan tunjangan khusus bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil. Guru yang bersertifikat pendidik dan bertugas di daerah khusus mendapatkan penghasilan tiga kali gaji pokok

(gaji pokok, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus) dalam sebulan dengan harapan guru-guru lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Akan tetapi, berbagai insentif ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Hasil penelitian menyebutkan tingkat kemangkiran guru penerima Tunjangan Khusus Guru (TKG) ternyata lebih tinggi dibanding guru yang tidak menerima TKG (ACDP, 2013)

Dalam upaya meningkatkan keefektifan penggunaan anggaran pendidikan dan agar lebih berdampak pada hasil belajar peserta didik, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia meluncurkan program Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru). KIAT Guru bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui pemberdayaan masyarakat dan pengaitan pembayaran tunjangan guru di 203 sekolah di desa sangat terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Manggarai Barat, Manggarai Timur) dan Kalimantan Barat (Landak, Ketapang, dan Sintang).

Sepanjang 2016-2018, Program Rintisan Kebijakan KIAT Guru telah mengujicoba tiga model pendekatan, yaitu pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta pembayaran TK berbasis kehadiran guru, dan pemberdayaan masyarakat serta pembayaran Tunjangan Khusus (TK) berbasis kualitas layanan guru. Evaluasi dampak pada tahap rintisan KIAT Guru menemukan bahwa setelah satu tahun berjalan, sekolah dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan pembayaran tunjangan khusus berbasis kehadiran guru memiliki dampak paling positif. Pencapaian hasil belajar murid di kelompok pendekatan ini tiga setengah kali lebih cepat dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang tidak menerima intervensi KIAT Guru.

Melihat hasil pada tahap rintisan, maka di tahun 2019 pemerintah daerah lima kabupaten berkomitmen memperluas cakupan program menjadi 410 dengan menerapkan pemberdayaan



masyarakat dengan pengaitan tunjangan khusus berbasis kehadiran. Pada tahap perluasan ini diterapkan dua model yakni pendekatan mandiri dan pendampingan pada 207 sekolah baru.

Memperkuat Peran Pengawas dan Komite

Pada kelompok perluasan mandiri KGIAT Guru melibatkan pengawas dalam tahap pelaksanaan program untuk supervisi dan pembinaan kepada seluruh sekolah peserta program. Di Kabupaten Manggarai Barat, program perluasan mandiri diterapkan di 10 sekolah dasar yang tersebar di 9 desa dan 6 kecamatan.

“Dulu sebelum ada KGIAT Guru, sebelum jam pelajaran dimulai, guru tidak hadir di kelas. Kami meminta anak-anak untuk mencari guru-guru mereka. Dengan adanya KGIAT Guru, kehadiran siswapun meningkat, karena melihat guru cepat datang”, ujar Pak Gaspar Jehadan, S.Pd., Pengawas Sekolah dari Manggarai Barat.

Pada kelompok perluasan pendampingan, Dinas Pendidikan meminta pengawas untuk melakukan pemantauan pelaksanaan KGIAT Guru

melalui kegiatan uji petik penilaian. Pihak sekolah melibatkan pengawas setiap bulannya untuk melakukan uji petik penilaian dan Pertemuan Rutin Bulanan bersama Kelompok Pengguna Layanan dan kader menyampaikan hasil pelaksanaan tugas guru selama sebulan.

Sekolah yang melaksanakan program KGIAT Guru terbukti berhasil meningkatkan kinerja guru. “Kami masuk di tiap sekolah mengetes anak-anak dan membandingkan sebelum dan sesudah dalam hal kemampuan membaca dan berhitung setiap bulannya, hasilnya menggembirakan” Pak Gaspar Jehadan menambahkan.

Peran pengawas dalam program perluasan KGIAT Guru masih sejalan dengan tupoksi pengawas yang telah ada sebelumnya yaitu mensupervisi guru dalam sisi akademik dan manajerial baik persiapan maupun proses pembelajaran. “Sekarang SD kami telah mengikuti berbagai macam lomba di tingkat kabupaten. Selain itu ada peningkatan kemampuan baca tulis siswa, Program KGIAT Guru memang memacu guru untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Kata kunci kesejahteraan



4



5

harus seimbang dengan kinerja. Guru yang masih kurang paham melaksanakan program ini akan dibimbing oleh pengawas” ujar Pak Gaspar di sela-sela Pelatihan Janji Bersama, Pertemuan Rutin Bulanan (PRB), dan Evaluasi Perluasan Mandiri Program KIAT Guru Kabupaten Manggarai Barat yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat, 6-8 November 2019 lalu. “Tantangannya adalah kesenjangan guru. Hanya guru yang memiliki NUPTK yang menerima tunjangan khusus, sehingga sangat memungkinkan muncul kecemburuan di antara guru. Kami sudah ajukan ke pemerintah pusat agar guru-guru di daerah terpencil menerima pengecualian namun belum mendapatkan respon hingga saat ini”, Pak Gaspar menambahkan.

“Sejak ada program KIAT Guru, Pengawas selalu datang memberi informasi terbaru. Harapan kami, program ini terus dijalankan dan termasuk dalam bimbingan, penyegaran-penyegaran pelatihan proses dan tahapan KIAT Guru setiap bulannya. Termasuk tantangan, kendala dan lain-lain dalam menjalankan KIAT

1 Aplikasi KIAT Kamera untuk merekam kehadiran guru di sekolah. Foto: Fauzan Idjajah/Bank Dunia

2 & 3 Tes cepat untuk menilai kemampuan dasar murid dalam Bahasa Indonesia dan Matematika di SD Konang, Manggarai Barat.

4 & 5 Tes cepat yang dilakukan di SD 08 Nanga Seran. Foto: Abdurrahman Doge/TNP2K

Guru”, ungkap Katalina Selina, Kepala Sekolah SDK Karoe Desa Cunca Lolos Kabupaten Manggarai Barat

Pada tahap perluasan ini, peran komite sekolah mengawasi jalannya KIAT Guru khususnya memastikan evaluasi janji bersama dapat terlaksana. “Tanggung jawab sebagai orang tua terhadap pendidikan anak, semakin tinggi, karena kami orang tua turut terlibat dalam proses penilaian guru setiap bulannya, kami terlibat langsung dan memantau belajar anak-anak kami”, Ujar Daniel Jangkur, Komite SDN Kandang, Desa Pulau Nuncung Manggarai Barat.

“Dengan adanya KIAT Guru, kerja bersama semua pihak antara sekolah, guru, pemerintah desa, pengawas dan komite bergotong royong untuk kemajuan pendidikan. Tantangan dan hambatan yang ditemui di sekolah, diselesaikan Bersama dan memacu orang bekerja lebih baik lagi. Anak-anak juga lebih aktif dan bertanggung jawab, mereka dituntut bertanya ke orang tua atau kakak untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Saya sangat optimis dengan program ini karena guru tambah semangat mendidik anak-anak apalagi dengan adanya tunjangan, orang tua lebih peka berkontribusi dan mengetahui pentingnya keterlibatan orang tua. Pemerintah Desa pun demikian”, Ujar Joseph Jeremy, Komite SDK Compang Desa Compang Kecamatan Pacar Manggarai Barat.

Memperkuat Komitmen Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

Untuk memastikan keberlanjutan program, berbagai peraturan tingkat kabupaten yang diperlukan telah disiapkan termasuk peningkatan kapasitas bagi pengemban tanggungjawab terkait program KIAT Guru.

Untuk itu, diperlukan pengalokasian anggaran sebagai konsekuensi dari pengembangan kapasitas pengembangan tanggungjawab mulai



Foto: Abdurrahman Doge/TNP2K

dari desa sampai kabupaten. Begitu pula di tingkat desa, alokasi penggunaan Dana Desa (DD) untuk KIAT Guru harus memiliki payung hukum atau acuan formal bagi desa sehingga tidak akan ada persoalan di kemudian hari. Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat menganggarkan sekitar 400 juta rupiah dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) dan 180 juta rupiah dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat untuk anggaran kemitraan yang diperkuat dengan Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan KIAT Guru Tahun 2019 sebagai dasar regulasi.

Selain itu, salah satu kunci keberhasilan program ini terletak di desa, bagaimana desa mendukung program ini dengan mendorong penggunaan dana desa dalam tiap proses pelaksanaan program. Masing-masing desa mengalokasikan dan menentukan besaran biaya yang dapat dipenuhi oleh desa sesuai dengan kemampuan desa dan desain RAB yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa masing-masing kabupaten.

“Sejak KIAT Guru masuk Januari 2018 di Desa Cinca Lolos, kami diminta untuk mengalokasikan anggaran untuk program KIAT Guru. Untuk itu,

kami menindaklanjuti dengan proses penyusunan APBD Desa dan telah memasukkan anggaran KIAT Guru sebanyak 23 juta rupiah setiap tahunnya. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan KIAT Guru di tingkat desa seperti sosialisasi di tingkat desa, transportasi pengurus komite, alat tulis, pertemuan rutin bulanan hingga pertemuan evaluasi termasuk membiayai kegiatan perjalanan dinas untuk pelatihan KIAT Guru. Selama ini, kinerja guru tidak ada yang pantau dengan adanya KIAT Guru, guru harus siap dievaluasi oleh masyarakat. Harapannya KIAT Guru ini terus ada demi mencetak SDM Unggul di desa-desa terpencil”, ujar Pak Fransiskus Amat, Kepala Desa Cinca Lolos, Kecamatan Mbeliling Manggarai Barat.

Pelaksanaan Program Pemantapan dan Perluasan KIAT Guru menekankan semangat gotong-royong semua pihak dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar murid menuju Indonesia Maju, sumberdaya manusia harus ditingkatkan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KIAT Guru dapat menghubungi info@bakti.or.id

5 Cara Dobrak Stereotip Peran Gender dalam Keluarga

Oleh
SHAFIRA AMALIA

Stereotip peran gender yang mengakar di masyarakat tidak hanya membahayakan perempuan, tapi juga laki-laki.

“JM”, 21, mengingat bagaimana ia hampir tidak dapat kuliah di Universitas Telkom Bandung tempat ia sekarang menimba ilmu, karena ayahnya hanya mengalokasikan biaya kuliah untuk abang dan adik laki-lakinya.

“Kami memang bukan keluarga yang berada, sehingga biaya kuliah untuk anak sangat terbatas. Selain itu, menurut Ayah, perempuan tidak perlu menuntut ilmu karena pada akhirnya hanya akan melayani suaminya kelak,” ujarnya kepada Magdalene.

Dengan usahanya sendiri, JM kemudian berhasil mendapat beasiswa untuk jurusan Seni Murni di Telkom.

JM hanya satu contoh bagaimana banyak orang terpaksa harus memenuhi tuntutan keluarga berdasarkan stereotip peran gender tertentu. Stereotip peran gender ini masih mengakar kuat di dalam masyarakat Indonesia yang masih konservatif, padahal penekanan pada stereotip gender ini bisa berdampak negatif sampai berujung pada kekerasan.



Jane L. Pietra, Psikolog dari Yayasan Pulih, mengatakan bahwa peran gender sendiri sebenarnya adalah konstruksi sosial yang seharusnya bersifat cair, dapat berubah, dipersilangkan ataupun dipertukarkan.

“Seharusnya tidak ada pembagian kaku antara peran gender laki-laki dan perempuan. Namun budaya patriarki melahirkan nilai-nilai yang menempatkan posisi laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai subordinasi laki-laki,” ujarnya kepada Magdalene.

“Nilai ini diturunkan dari generasi ke generasi sehingga diyakini sebagai sebuah kebenaran dan norma masyarakat. Ini yang menjadi alasan kenapa orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk berperilaku sesuai dengan norma tersebut dan sesuai dengan gender mereka.”

Peran gender yang kaku dan mengakar ini berdampak antara lain pada tuntutan perempuan untuk selalu lembut dan menjadi subordinat laki-laki, membuat perempuan terpapar pada kekerasan.

“Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perempuan, tetapi juga laki-laki. Misalnya saja tuntutan laki-laki untuk selalu menampilkan sikap maskulinnya dengan tidak menangis dan tidak boleh curhat maka akan juga berdampak secara psikologis terhadap laki-laki. Belum lagi ketika ada laki-laki yang tidak bisa memenuhi harapan peran gendernya, karena tidak semua laki-laki dapat memenuhi tuntutan tersebut,” ujar Jane.

Menurutnya, orang tua memang memiliki peran penting dalam mendobrak stereotip peran gender dalam keluarga, namun siapa pun juga dapat berperan untuk menghapus dampak stereotip gender tersebut. Berikut adalah tips dari Jane dalam mendobrak stereotip peran gender.

1 Kurangi ekspektasi kepada seseorang berdasarkan stereotip peran gender

Langkah pertama adalah mempelajari soal gender, peran gender, dan ekspektasi masyarakat terhadap peran seseorang berdasarkan gender. Kita harus mulai menyadari bahwa gender bukanlah sesuatu yang kaku dan perilaku

seseorang tidak harus sesuai dengan apa yang sudah diterima oleh masyarakat, menurut Jane.

Langkah paling mudah adalah dengan mengubah sedikit kebiasaan yang secara tidak langsung membeda-bedakan perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Misalnya, jangan membatasi mainan anak di mana laki-laki harus bermain mobil atau robot, sementara perempuan harus main dengan boneka. Atau mungkin membersihkan piring sendiri setelah makan tanpa berpikir bahwa itu adalah tugas perempuan.

Dengan memulai dari diri sendiri, kita bisa mendobrak stereotip peran gender yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi.

2 Berhati-hatilah dengan kata-kata

Mungkin kita tidak sengaja atau tidak menyadarinya, tetapi komentar-komentar yang kita lontarkan kepada orang lain memiliki dampak yang besar di kemudian hari. Komentar seperti, “Cowok itu harus tangguh dan tidak boleh menangis” atau “Perempuan itu harus patuh sama suami” itu secara tidak langsung membenarkan stereotip peran gender yang terbentuk dari budaya patriarki.

Mulailah untuk menyadari bahwa gender adalah sesuatu yang tidak kaku dan bahkan dapat berubah. Jangan membeda-bedakan perilaku sesuai dengan gender, sadari bahwa laki-laki juga bebas untuk menunjukkan perasaannya dan perempuan tidak harus lembut setiap saat. Hal ini sangat berpengaruh kepada kepribadian seseorang ke depannya.

3 Adil dalam pembagian tugas rumah tangga

Berhenti berpikir bahwa semua pekerjaan peran domestik hanya cocok untuk perempuan. Ingatkan keluargamu bahwa membersihkan rumah bisa dilakukan oleh semua orang, bukan hanya perempuan.

Hasil riset program kampanye Yayasan Pulih, #KitaMulaiSekarang, menunjukkan banyaknya keuntungan untuk keluarga jika laki-laki lebih berperan dalam mengelola rumah tangga.

Seharusnya tidak ada pembagian kaku antara peran gender laki-laki dan perempuan. Namun budaya patriarki melahirkan nilai-nilai yang menempatkan posisi laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai subordinasi laki-laki

Perempuan

- Lebih berdaya dan memiliki akses pekerjaan serta pendidikan yang setara dengan laki-laki
- Fungsi agensi perempuan juga semakin tinggi dalam ranah pembuat keputusan di level domestik, komunitas, institusi, dan kebijakan.
- Meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya (misalnya kepemilikan tanah, akses finansial, akses terhadap lembaga layanan kesehatan).

Laki-laki

- Meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan istri, anak, dan keluarga besar
- Memiliki kualitas hidup yang lebih baik ketika ada pandangan baru mengenai maskulinitas (positif maskulinitas)
- Meningkatkan kemampuan laki-laki untuk dapat mengakses layanan kesehatan serta mengurangi perilaku berisiko yang diakibatkan oleh konstruksi maskulinitas yang kaku.

Keluarga dan komunitas

- Lebih inklusif, memiliki proses pengambilan keputusan yang setara dan adil gender di rumah, komunitas, institusi, sampai kepada pemegang kebijakan.
- Terjadinya pemberdayaan ekonomi dalam ranah domestik, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi akibat semakin banyaknya akses terhadap sumber daya dan meningkatnya kemampuan SDM
- Memiliki resiliensi yang baik terhadap konflik.

4 Peraturan yang adil antara laki-laki dan perempuan

Dalam keluarga, biasanya anak perempuan menghadapi peraturan yang lebih ketat, seperti

tidak boleh pulang malam. Ini adalah suatu stereotip gender yang harus didobrak dalam keluarga karena peraturan antara keluarga seharusnya adil dan tidak memandang gender. Risiko dan bahaya berkegiatan di malam hari dialami oleh semua orang, tidak hanya perempuan. Jika perempuan dalam keluarga hanya dibolehkan untuk pulang tidak lebih jam sembilan malam, maka seharusnya peraturan yang sama berlaku untuk laki-laki di dalam keluarga. Ini juga berhubungan dengan poin selanjutnya yaitu:

5 Memberi dukungan dan kesempatan yang sama tanpa memandang gender

Alasan berkegiatan hingga malam hari sering kali adalah tugas kuliah atau pekerjaan. Jika kita membatasi waktu untuk perempuan berkegiatan, mereka tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan anggota keluarga yang laki-laki.

Kita harus mendukung cita-cita semua orang terlepas dari gendernya, dan salah satu cara mendukung yang paling gampang adalah dengan memberikan mereka kesempatan yang adil dan cukup.

Saat ini JM sedang menempuh semester akhir di Telkom, dan tidak sekalipun menyesal telah memilih untuk memperjuangkan cita-citanya di dalam dunia seni.

“Aku sebagai perempuan ingin berpendidikan tinggi supaya anak-anak aku nanti menyadari bahwa mencapai mimpi-mimpinya adalah sesuatu yang mungkin terjadi,” kata JM.

“Aku tidak mau ada perempuan-perempuan lain di luar sana yang cita-citanya dirampas begitu saja dan mereka mengalah. Apalagi jika yang menjatuhkan mereka adalah keluarganya sendiri.”

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini adalah bagian dari kampanye 1001 Cara Bicara, hasil kerja sama Magdalene dan SKATA, sebuah inisiatif digital yang membantu pemerintah Indonesia dalam membangun keluarga melalui perencanaan yang lebih baik.
<https://magdalene.co/story/cara-dobrak-stereotipe-peran-gender-dalam-keluarga>

Partisipasi Perempuan di Negeri Kilang

Oleh **YAN WEMAY & M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Adat dan perempuan adalah dua unsur yang tak terpisah satu dengan yang lain. Sering perempuan dituding dan disalahkan karena alasan adat yang turun-temurun. Perempuan juga diberi peran yang terbatas, bahkan tidak sama sekali, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, karena alasan adat yang telah dipegang sejak lama.

Mungkin tidak menjadi masalah, jika adat yang dianut dan dijadikan hukum selalu adil terhadap, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, di banyak suku di Indonesia, termasuk di Maluku, adat atau Hukum Adat yang dijadikan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, selalu menempatkan perempuan pada posisi kedua atau di ranah kehidupan domestik.

Mungkin di jaman dahulu, aturan adat seperti ini masih cocok, karena kondisi sosial yang dianggap tidak kondusif bagi perempuan, sehingga perempuan harus bekerja pada ranah dalam rumah tangga atau domestik.

Saat ini situasi telah berubah jauh, namun dari beberapa catatan atau informasi yang kami dapatkan dan amati, masih banyak praktik diskriminatif yang terjadi bagi kaum perempuan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan publik.

Pada lingkungan domestik perempuan lebih banyak berperan untuk mengatur dan mengerjakan banyak hal dibandingkan dengan kaum laki laki, dan kebanyakan kaum laki laki yang bekerja pada lingkungan publik, sebenarnya hanya melakukan sedikit pekerjaan. Pekerjaan di lingkungan publik dianggap sebagai pekerjaan laki-laki.

Hukum adat atau ketentuan adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negeri atau Desa di Kota Ambon yang masih memegang secara ketat tradisi atau adat dan hukum adat.

Negeri Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon adalah salah satu negeri atau Desa Adat di Kota Ambon yang dipimpin oleh seorang raja (sebutan untuk kepala desa pada pemerintahan desa adat).



Foto: Yan Wemay/Yayasan BaKTI

Sejak dahulu tidak ada perempuan yang menduduki struktur di pemerintahan Negeri Kilang karena telah menjadi ketentuan secara turun-temurun dan menjadi hukum adat bahwa hanya laki-laki yang dapat menjadi bagian dari pemerintahan adat. Padahal berdasarkan data kependudukan tahun 2016, Negeri Kilang dihuni oleh 1.057 penduduk dimana 555 orang atau 52% di antaranya adalah perempuan dan 502 laki laki.

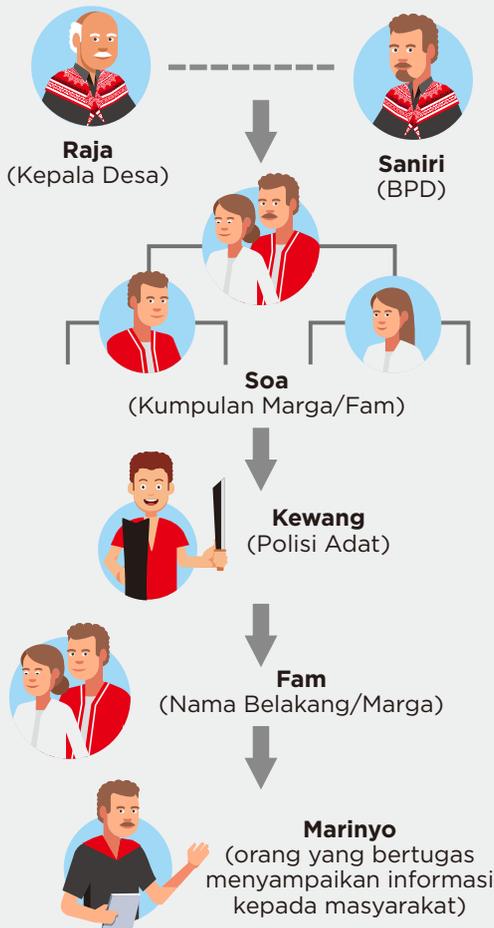
Namun kondisi ini berubah sejak warga Negeri Kilang terpapar pengetahuan dan keterampilan baru dari Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Tahun 2014 Program MAMPU-BaKTI mulai bekerja di 25 negeri (desa) dan kelurahan di Kota Ambon. Di Negeri Kilang, Program MAMPU dimulai dengan membentuk Kelompok Konstituen, kelompok yang bertujuan mendorong partisipasi aktif warga, terutama perempuan dalam berbagai urusan sosial kemasyarakatan, termasuk upaya warga memperjuangkan hak-haknya dan mengakses layanan pemerintah. Dari namanya, Kelompok Konstituen dibentuk untuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen.

Kelompok Konstituen merupakan organisasi resmi di desa dan kelurahan, karena mendapatkan pengakuan melalui surat keputusan pengangkatan pengurus dari pemerintah desa atau kelurahan. Pengurus dan anggota Kelompok Konstituen adalah perwakilan warga di satu daerah pemilihan (dapil) dimana 70% dari jumlah total anggotanya adalah perempuan, termasuk perempuan miskin. Kelompok Konstituen adalah mitra strategis pemerintah desa/kelurahan untuk memastikan pemenuhan hak-hak warga.

Setelah pembentukan, pengurus dan anggota Kelompok Konstituen mengikuti beberapa kegiatan peningkatan kapasitas berupa diskusi, pelatihan, dan studi banding. Pelatihan yang diperoleh antara lain mengenai hak-hak perempuan, hak asasi manusia, pengorganisasian, dan penanganan kasus. Adapun materi-materi yang didiskusikan meliputi berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat, terutama berhubungan dengan pelayanan publik oleh negara.

Kontribusi Kelompok Konstituen yang nyata di masyarakat adalah penanganan dan advokasi kasus, advokasi penganggaran di desa, dan

STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT DI KOTA AMBON



Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

mendorong perempuan untuk terlibat di dalam urusan publik, termasuk dalam pemerintah negeri. Kelompok Konstituen Negeri Kilang mulai mendorong keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan Negeri Kilang agar hal-hal terkait perlindungan dan kesejahteraan kaum perempuan dapat diperhatikan dengan lebih seksama.

Akhirnya pada tahun 2016 dua perempuan berhasil duduk sebagai Saniri atau Badan Permusyawaratan Desa di Negeri Kilang. Kedua perempuan itu adalah yaitu Novita Latubessy atau biasa dikenal dengan Olin Latupapua dan

Johanna Latuheru. Novita Latubessy adalah salah satu pengurus Kelompok Konstituen di Negeri Kilang.

Pada tahun 2017 juga terjadi perubahan baru dalam struktur adat Negeri Kilang. Sekretaris negeri akhirnya dijabat oleh seorang perempuan bernama Novianti Salamena. Novianti Salamena adalah anggota Kelompok Konstituen di Negeri Kilang. Salah satu anggota Kelompok Konstituen yang lain, Feby de Fretes juga menjadi pengurus Bumdes di Negeri Kilang. Ini adalah kemajuan yang sangat luar biasa kaum perempuan di bagi Negeri Kilang.

Kini setiap pembicaraan-pembicaraan di dalam pemerintahan negeri lebih berwawasan dan juga berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan perempuan dan anak. Kebijakan, program, dan anggaran, tidak lagi bias dan mulai banyak yang mempertimbangkan manfaat baginya perempuan dan anak.

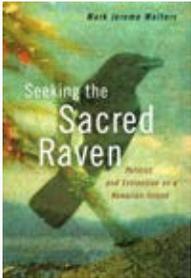
Kegiatan peningkatan kapasitas dan pengetahuan serta beragam aktivitas yang diorganisir oleh Kelompok Konstituen telah berkontribusi besar terhadap kiprah perempuan dalam pemerintahan di Negeri Kilang, baik sebagai Saniri, Sekretaris Negeri, maupun Pengurus Bumdes.

Perubahan paradigma dimulai dari pelibatan perempuan, pemangku adat, dan kepala soa dalam setiap kegiatan-kegiatan Kelompok Konstituen. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, banyak perempuan yang aktif mengajukan pokok-pokok pikiran yang cerdas bagi kemajuan negeri. Selain itu, pemerintah negeri maupun tokoh-tokoh adat di Negeri Kilang juga membuka diri dan bersedia memberi peluang kepada perempuan untuk berkontribusi langsung dalam pemerintahan Negeri Kilang.

Kesimpulannya bahwa ketika perempuan berdaya dan punya kemampuan dan keunggulan maka akan diberi ruang untuk berkiprah. Namun laki-laki juga harus sadar bahwa banyak sekali perempuan yang mempunyai kapasitas untuk didukung, sebagaimana terjadi di Negeri Kilang.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU-BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id



Seeking the Sacred Raven

PENULIS Mark Jerome Walters

Akankah 'Alala kembali ke alam liar? Seekor burung yang disucikan bagi orang Hawaii dan anggota keluarga gagak, 'Alala hari ini hanya bertahan hidup di penangkaran. Bagaimana spesies itu pernah berkembang, bagaimana ia telah hampir punah, dan bagaimana orang berjuang untuk menyelamatkannya, adalah kisah mencekam dari *Seeking the Sacred Raven*. Selama bertahun-tahun, penulis Mark Jerome Walters telah melacak peran burung suci dalam budaya Hawaii dan kemalangan sedih 'Alala yang tak tergoyahkan. Menjelajah hutan hujan Hawaii yang tinggi di Mauna Loa, berbicara dengan ahli biologi, pemilik tanah, dan pejabat pemerintah, ia telah membuat kisah epik tentang peluang yang terlewatkan dan niat terbaik yang berakhir salah.



Kudeta 1 Oktober 1965 - Sebuah Studi tentang Konspirasi

PENULIS Victor M. Fic

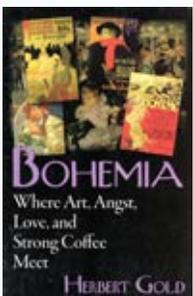
Buku ini merupakan publikasi serius oleh seorang ilmuwan Ceko, Victor Miroslav Fic, yang diam-diam telah mengumpulkan bahan-bahan sejak tahun 1968, dan tertutup dalam peti hingga berdebu selama 35 tahun. Tesis yang diusungnya cukup menghentak, yang selama ini luput dari perhatian banyak pakar lain: bahwa Tragedi 1 Oktober 1965 merupakan konspirasi antara Sukarno-Aidit-Mao Tse-tung (Cina) untuk membersihkan pucuk pimpinan Angkatan Darat, namun pada akhirnya menjatuhkan Soekarno sendiri dan hancurnya PKI.



Tragedi Mei 1998 dalam Perjalanan Bangsa Disangkal!

PENULIS Publikasi Komnas Perempuan

Peristiwa Tragedi Mei 1998 merupakan pukulan yang sangat menyakitkan sekaligus pemicu yang luar biasa kuatnya bagi kaum perempuan, untuk bergerak dan berjuang demi martabat diri dan sesamanya. Semua ini dilakukan di tengah realita penyangkalan yang masih berlangsung hingga saat ini. Melalui buku ini, Komnas Perempuan bermaksud untuk melengkapi ingatan kita tentang Tragedi Mei 1998 dengan menyajikan cerita kegigihan perjuangan para korban untuk bangkit dari penderitaannya.



Bohemia Where Art, Angst, Love, and Strong Coffee Meet

PENULIS Herbert Gold

Buku ini, dalam tradisi agung Hemingway's *A Moveable Feast*, melihat dunia ide yang luar biasa yang dikenal sebagai Bohemia. Membawa pembaca ke sebuah pesta di Rive Gauche di Paris tahun 1950-an untuk bertemu William Burroughs dan Allen Ginsberg, untuk duduk di kedai kopi Tel Aviv tepat setelah Perang Enam Hari, menyeruput espresso dan berdebat politik dan tidak sengaja berhadapan dengan sekelompok aktor jalanan yang terpengaruh LSD di San Francisco pada puncak tahun 1960-an.

Terimakasih sumbangan buku dari The Asia Foundation (TAF) melalui Program Books for Asia. Buku-buku tersebut diatas dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI. Jika anda memiliki buku atau publikasi lainnya yang ingin dipublikasikan sila hubungi kami di BaKTI.

PENCARIAN PRAKTIK CERDAS 2020!

BaKTI kembali mengajak individu, lembaga, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, program mitra pembangunan, siapa saja untuk bergabung dalam pencarian Praktik Cerdas 2020 untuk dipresentasikan dalam Festival Forum Kawasan Timur Indonesia IX Tahun 2020. Praktik Cerdas adalah kegiatan yang berhasil menjawab tantangan pembangunan dalam berbagai bidang di Kawasan Timur Indonesia.

Untuk bisa disebut Praktik Cerdas, BaKTI menggunakan kriteria: **inovatif, berdampak nyata, partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat miskin dan marjinal serta berkeadilan gender.**

Bila Anda sedang mengerjakan sebuah inisiatif yang berhasil menjawab tantangan pembangunan di daerah Anda, atau mengetahui kegiatan keren yang menginspirasi, nominasikan kegiatan tersebut sebagai Praktik Cerdas 2020!



Unduh formulir praktik cerdas di <http://bit.ly/praktikcerdasBaKTI2020> dan kirimkan via email ke info@bakti.or.id

Paling lambat tanggal 30 April 2020

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai praktik cerdas silakan mengunjungi <http://praktikcerdas.bakti.or.id>



InfoBaKTI



YayasanBaKTI



InfoBaKTI



www.bakti.or.id